

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (*TAKE  
OVER*) DI BANK JATENG CABANG SYARIAH SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi  
Syariah



Disusun oleh:

**Millaturrofi'ah**  
**132311011**

Dosen Pembimbing:

**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
**NIP. 19670117 199703 1001**  
**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum**  
**NIP. 19760615 200501 1005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2017**

**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag**

Perum Kaliwungu Indah Rt. 05 Rw. X No. 19

Kaliwungu Kendal

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum**

Bangetayu Regency No. A.16, Rt.9/I

Bangetayu Wetan, Genuk

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Millaturrofi'ah

NIM : 132311011

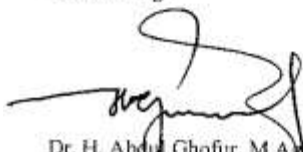
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqaosahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag  
NIP. 19670117 199703 100

Pembimbing II



Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum  
NIP. 19760615 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Walisongo Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Millaturrofi'ah  
NIM : 132311011  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah  
Judul : "Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over)  
di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada  
tanggal:

**16 Juni 2017**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata  
Satu (S1) tahun akademik 2017

Semarang, 16 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Sidang

**Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.**  
NIP. 19730821 200003 1 002

Sekretaris Sidang

**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag**  
NIP. 19670117 1997031 001

Penguji I

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag**  
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji II

**Drs. H. Mohamad Solek, M.A**  
NIP. 19660318 199303 1 004

Pembimbing I

**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.**  
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum**  
NIP. 19760615 200501 1 005



## MOTTO

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا

*“lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya”.*

(QS. Al- Imran : 103)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu diharapkan. Sebagai wujud ucapan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk

1. **Ayah dan Ibu (Bapak Jumairin dan Ibu Siti Zuhriyah)**

*“Sosok orang tua yang berbeda dengan orang tua lainnya bagi penulis, berkat kesabarannya, doa dan kerja keras yang telah dicurahkan demi sekedar melihat kami bahagia dan mampu memberikan manfaat bagi sesama. Semoga Allah SWT memberi keberkahan di sepanjang usianya”.*

2. **Kedua adik kandungku, (Aulia Rizki Ramadhani dan M. Nur Afnan Al Afif)**

*“Kita saling melengkapi dan menyayangi dengan caranya sendiri-sendiri. Mari tetap bersinergi mewujudkan segala cita-cita bapak dan ibu. Semoga tetap dalam jalur prestasi dan mampu memberi senyum haru keada orang tua kita. Terimakasih atas keberadaan kalian, telah memacu penulis untuk senantiasa menjadi diri yang baik untuk jadi panutan”.*

3. **Keluarga Besarku (Mbah Rayi, Mbah Roko, Paman, Bulek, Pakdhe, Budhe dan sepupu-sepupu lucu)**

*“kalian telah memberi warna di hidupku. Terimakasih atas doa, dukungan dan senyuman. Perhatian dan nasehat yang senantiasa dikisahkan telah diberikan menjadikan penulis mengerti apa yang harus penulis lakukan”.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 15 Mei 2017

 Deklarator  
Ullaturrofi'ah  
132311011

## TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan acuan untuk mengetahui maksud dari bentuk bahasa lain seperti bahasa arab, istilah bahasa arab, nama orang, judul buku, dan lain sebagainya yang pada asalnya ditulis menggunakan dialek lain menjadi tulisan bahasa Indonesia. untuk menjamin konsistensi agar mampu menggambarkan sesuai dengan bentuk asalnya. oleh karena itu perlu ditetapkan suatu transliterasi sebagai berikut:

### 1. Konsonan

ء = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = Sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = `	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### 2. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

3. Diftong

اي = ay

او = aw

4. Syaddah / Tasydid (ّ)

Tasydid dilambangkan dengan menggunakan huruf konsonan ganda, misal كسّر *kassara*.

5. Kata Sandang ( ال )

Kata sandang ( ال ) ditulis dengan *al*, misal العقل ditulis *al-`aql*.

Ditulis dengan huruf kecil kecuali dipermulaan kalimat.



## Abstrak

Kesadaran gaya hidup halal oleh sebagian kalangan muslim di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap perkembangan industri keuangan syariah, tidak terkecuali bank syariah. *Take over* atau disebut juga dengan pengalihan hutang adalah satu contoh transaksi yang menggambarkan gaya hidup halal di Indonesia. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menjadi salah satu bank syariah yang menyediakan jasa pengalihan hutang (*take over*). Peraturan tentang pengalihan hutang di Indonesia telah diatur dalam KUHP, UU Perbankan Syariah, PBI, SEBI dan Fatwa DSN MUI, namun dalam penjelasan beberapa regulasi tersebut terdapat sebuah perbedaan mengenai skema akad yang digunakan untuk pengalihan hutang di bank syariah. Dalam konteks penelitian hukum normatif, perbedaan tersebut memunculkan isu hukum, yaitu pertentangan hukum (*conflict of norm*).

Berangkat dari masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan untuk mengetahui analisis pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yaitu meliputi, apa dasar hukum pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dan bagaimana analisis pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.

Dalam menganalisis, menjelaskan dan menyimpulkan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka berupa Undang-Undang dan Fatwa DSN MUI, selain itu juga melihat pelaksanaan di lapangan, dalam hal ini terjun langsung melihat skema *take over* di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang adalah menganut pada SE Direksi Nomor 7627/ HT.01.03/ SYAR/ 2016 Semarang, 31 Agustus 2016 perihal

Persyaratan dan Tata Cara *Take Over* Pembiayaan dari Bank Lain di Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah, yaitu menggunakan 4 alternatif sebagaimana skema akad yang difatwakan DSN MUI Monor 31 Tahun 2002 bukan menggunakan akad *hiwalah* sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia. Mereka menggunakan alternatif tersebut karena alternatif yang ditawarkan UU perbankan dan regulasi hukum positif lainnya dinilai belum jelas dan sulit untuk diterapkan di bank syariah. Selanjutnya, pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang menggunakan empat alternatif akad sebagaimana ketentuan fatwa DSN MUI Monor 31 Tahun 2002 secara yuridis tidak dipermasalahkan, karena tidak ada peraturan yang mengatur pelarangan mengenai itu, baik dari UU Perbankan syariah, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau BI (Bank Indonesia). Akan tetapi, karancuan regulasi tersebut berdampak pada munculnya pertentangan hukum karena isu hukum timbul akibat adanya dua proporsi hukum yang saling berhubungan satu sama lain.

**Kata Kunci**

(Pengalihan Hutang (*take over*), *Hiwalah*, Hukum)

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan akal kepada manusia dan menjadikan manusia mampu membedakan kebaikan dan kebathilan, sehingga manusia termasuk makhluk yang mulia. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menjadi zaman peradaban yang maju baik dari segi kehidupan berbangsa, bernegara maupun beragama. Sehingga keilmuan dan kebutuhan rohani bisa berjalan beriringan dan seimbang.

Berkat pertolongan dan hidayah dari-Nya disertai dengan usaha kerja keras, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang Syarah Semarang**” dengan lancar.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi tidak lepas dari bantuan, dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Muamalah sekaligus dosen pembimbing II. Yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku dosen pembimbing I, sekaligus ayah bagi penulis dalam menjalankan perkuliahan dari sejak semester awal hingga sekarang. Bukan kali pertama penulis menjadi mahasiswa bimbinganya dalam menjalankan penelitian, terimakasih atas segala dukungan, ide, arahan serta perhatian terhadap penulis, baik dalam menyusun skripsi ini, perkuliahan, hingga pembinaanya terhadap organisasi yang penulis ikuti. Salam *ta'dzim*.
5. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku wali studi penulis yang senantiasa membina dalam proses akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu pada khususnya dan segenap bapak ibu dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
7. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan hukum pada khususnya dan segenap staff dan karyawan di lingkungan UIN Walisongo Semarang pada umumnya.
8. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang telah bersedia membantu penulis dalam melaksanakan penelitian di tempat tersebut.

9. Ibu Gunawati selaku pimpinan cabang Bank Jateng Cabang Syariah yang sungguh ramah, mengasihi, dan mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Salam *ta'dzim* bu Gun..
10. Ibu Siti Patmiatun, selaku wakil pimpinan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang mendampingi dan mengarahkan selama penulis melakukan penelitian di Bank Jateng Cabang Syaruah tersebut. Terimakasih atas tenaga, waktu dan fikiran yang telah diberikan kepada penulis bu..
11. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq. M.A selaku guru besar Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Dewan Pengawas Syariah Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang telah bersedia menjadi rujukan dan nara sumber penulis dalam menganalisis penelitian skripsi ini.
12. Teman-teman dan orang terbaik yang jauh. Meski jauh doa dan dukungan kalian senantiasa tersampaikan kepada penulis.
13. Keluarga Muamalah 2013 A, yang senantiasa memberi tawa, dan banyak berdiskusi terkait skripsi ini.
14. Sahabatku keluarga besar ForSHEI, tempat dimana saya berproses dan tau banyak hal. Dididik, dituntun dan ditemani untuk bersikap profesional dan terukur. Diemong, diajak, dirangkul untuk mengenal sebuah kompetisi dan sedikit prestasi. Terlalu banyak suka-duka selama aktif dalam organisasi yang luar biasa ini, terima kasih sudah diperkenankan menjadi bagian

dari keluarga besar ForSHEI. Terima kasih kepada panutan saya mas Herry, mas Irham, mas Sofa, mas Mamduh, Mas Ulin, Mas Asep dan seluruh keluarga besar KA-ForSHEI. Kepada ForSHEI'13 yang senantiasa kompak tanpa sebab, bangga dapat berproses bareng kalian. Tim media dan jurnalistik yang senantiasa menemani berprosesku, melatih *sklill* hingga kurasa kebermanfaatannya, termasuk di dalamnya adalah penyusunan skripsi ini (Arip, Mba Sulis, Vicky, Mudrika, Dhita, Muna, Aziz, Olip, Syihab dkk) tetap istiqomah dan selalu berinovasi. Terimakasih kepada ForSHEI'14, ForSHEI'15, dan ForSHEI'16 selamat berproses dan semangat mewujudkan cita-cita luhur organisasi kita, mendakwahkan Islam dalam bidang ekonomi dengan pola organisasi yang apik dan profesional. Penulis sungguh bangga menjadi bagian dari Forum Studi Hukum Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang ini, dan memohon maaf kontribusi penulis belum sebanding dengan apa yang penulis dapat dari(mu).

15. Tim BPH FosJat 2016-2017. Terimakasih telah mengisi aktifitas di masa-masa semester tua ini. Terkhusus untuk #BodyguardGue yang membuat penulis di penghujung masa perkuliahan ini lebih lebih dalam mengenal kalian sebagai lingkaran ku.
16. Tim KKN ke-67 posko 40, yang menyebut dirinya sebagai "Sekawan Doso". Tim kopasus yang memberi hal baru di tempat baru.

17. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, penulis penulis tidak dapat memberikan apa-apa dan hanya ucapan terimakasih. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 15 Mei 2017

Penulis,



**Millaturrofi'ah**  
**132311011**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II KONSEP UMUM PENGALIHAN HUTANG (<i>TAKE OVER</i>) DAN REGULASINYA DI INDONESIA</b>	
A. Pengalihan Hutang dalam Islam ( <i>Hiwalah</i> ) .....	21
1. Pengertian Pengalihan Hutang ( <i>Hiwalah</i> ) .....	21
2. Dasar Hukum Pengalihan Hutang ( <i>Hiwalah</i> ) ....	24



3. Macam-Macam Pengalihan Hutang ( <i>Hiwalah</i> ) .....	26
4. Rukun dan Syarat Pengalihan Hutang ( <i>Hiwalah</i> ) .....	29
B. Pengalihan Hutang ( <i>Take Over</i> ) dalam Perbankan .....	34
1. Pengertian Pengalihan Hutang ( <i>Take Over</i> ) .	34
2. Tujuan Pengalihan Hutang ( <i>Take Over</i> ) .....	38
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan Hutang ( <i>Take Over</i> ) di Indonesia .....	38
1. Landasan Hukum Positif Pelaksanaan Pengalihan Hutang ( <i>Take Over</i> ) .....	38
2. Konsep Pengalihan Hutang ( <i>Take Over</i> ) dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang .....	42
3. Konsep Pengalihan Hutang ( <i>Take Over</i> ) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DpBS 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah .....	50

### **BAB III PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG DI BANK JATENG CABANG SYARIAH SEMARANG**

A. Profil Bank Jateng Syariah .....	57
1. Sejarah Bank Jateng Syariah .....	57
2. Visi dan Misi Bank Jateng Syariah .....	60
3. Data Lembaga Bank Jateng Syariah.....	62
4. Profil Bank Jateng Cabang Syariah Semarang .....	63
5. <i>Job Description</i> Struktur Organisasi Bank Jateng Cabang Syariah Semarang .....	66
6. Produk Bank Jateng Cabang Syariah Semarang....	75
B. Pengalihan Hutang ( <i>Take Over</i> ) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang .....	81
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan Hutang ( <i>Take Over</i> ) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang .....	83
D. Pelaksanaan Pengalihan Hutang ( <i>Take Over</i> ) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang .....	85

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN  
HUTANG (*TAKE OVER*) DI BANK JATENG  
CABANG SYARIAH SEMARANG**

- A. Analisis Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan  
Hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang  
Syariah Semarang ..... 92
- B. Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*)  
di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ..... 97

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 110
- B. Saran-Saran ..... 113
- C. Penutup ..... 114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat lepas dari yang namanya kegiatan perikatan atau transaksi dengan sesama. Di antara transaksi yang berlaku di Indonesia, terhitung paling populer yakni transaksi jual beli. Jual beli merupakan kegiatan transaksi dalam bidang bisnis untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling suka rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>1</sup>

Sistem pembayaran jual beli yang tumbuh di masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara tunai atau secara kredit (angsuran). Jual beli kredit atau angsuran (*bai'u At-Taqsith*) yaitu suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang mana pembayaran barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif, 1987), h. 45.

<sup>2</sup> Cahiruman Pasaribu, suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 50.

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli bukan lagi hanya terjadi antar individu dengan individu atau jual beli langsung antara penjual dan pembeli. Sekarang hadir lembaga keuangan yang membantu transaksi jual beli dengan berbagai desain akad dan penyelesaiannya. Salah satu lembaga yang menjadi rujukan masyarakat dalam melakukan jual beli adalah perbankan. Perbankan bertindak sebagai lembaga yang menjembatani masyarakat untuk membeli barang, baik penyelesaian jual beli tersebut secara tunai ataupun secara kredit (cicilan). Dalam hal ini perbankan syariah berperan sebagai salah satu lembaga keuangan yang menyuguhkan kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Dalam dua dekade ini marak sekali pembiayaan jual beli di lembaga keuangan yang menggunakan akad atau perjanjian jual beli dengan cara kredit atau cicilan. Seperti dalam perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah, *market* terbesar dalam pembiayaan yakni dengan menggunakan akad *murabahah* atau pembiayaan jual beli *propherty* dalam bank syariah. Ketika jual beli tersebut dengan sistem cicilan, kemudian pihak nasabah belum bisa melunasi biaya jual beli itu, maka nasabah dapat menggunakan jasa *take over* (pengalihan hutang) di perbankan. Apabila di suatu akad atau perjanjian pembiayaan

jual beli di bank konvensional kemudian ingin berpindah atau mengalihkan hutangnya ke bank syariah agar tidak mempraktikkan riba, dapat juga mengajukan pengalihan hutang kepada bank syariah untuk bank konvensional.

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan pengalihan hutang (*take over*) di bank syariah adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah<sup>3</sup>.

Penyelesaian hutang secara *take over* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI NO 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang pengalihan hutang. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa yang dinamakan *take over* adalah pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Penyelesaian pengalihan hutang (*take over*) dalam fatwa tersebut menggunakan empat alternatif, yaitu: 1) menggunakan akad *al-Qardh*, *al-Bai'wa Murabahah*; 2) menggunakan akad *al-Syirkah al-Milk wa Murabahah*; 3)

---

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), edisi 4, cet. ke-8 h. 248.

menggunakan akad *al-Qardh wa al-Ijarah*; dan 4) menggunakan akad *al-Qardh, al-Bai' wa al-Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik* (IMBT).<sup>4</sup>

Hal yang berbeda ditemukan dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia. SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) juga menjadi acuan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank syariah, hal tersebut tertera dalam SEBI Nomor 10/ 14/ DpBS, 17 Maret 2008. Dalam SEBI terdapat ketentuan mengenai transaksi pengalihan hutang yakni menggunakan akad *hiwalah*.

*Hiwalah* adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhil atau madin*), pihak yang memberi hutang (*muhal atau da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal'alaih*). Dalam praktik perbankan, *hiwalah* dikenal dengan istilah *take over*. Dalam ketentuan SEBI pada poin IV.2. tentang pemberian jasa pengalihan hutang dapat menggunakan akad *hiwalah*.

Dengan demikian ada beberapa perbedaan dalam skema pengalihan hutang (*take over*) antara fatwa DSN MUI

---

<sup>4</sup> <http://www.arditobhinadi.com/berita-141-takeover-dari-transaksi-riba-ke-transaksi-syariah.html>. (diakses pada 20 Desember 2016 pukul 22.00 WIB)

dan Surat Edaran Bank Indonesia. Sementara itu, kedua regulasi tersebut memiliki kedudukan yang cenderung seimbang. Keduanya sama-sama menjadi pedoman pelaksanaan operasional bank syariah di Indonesia.

Mengacu pada uraian di atas, penulis menemukan sebuah masalah di mana Bank Jateng Syariah, sebagai salah satu Unit Usaha Syariah yang berada di Jawa Tengah melayani pengalihan hutang (*take over*) atas permintaan nasabah dengan menggunakan skema berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI, yakni memberikan *qardh* terlebih dahulu kemudian selanjutnya terjadi akad *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau *ijarah mytahiya bitamlik*. Berbeda dengan isi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia yang juga mengatur mengenai transaksi tersebut. Dapat ditegaskan bahwa terkait dengan pengalihan hutang (*take over*) dengan konsep syariah dalam fatwa DSN MUI menggunakan konsep *qard* kemudian 4 alternatif akad lainnya, sedangkan pengalihan hutang yang ada di Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) menggunakan akad *hiwalah*. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antar kedua kodifikasi tentang pelaksanaan operasional bank syariah.

Dalam konteks penelitian hukum normatif, perbedaan tersebut memunculkan isu hukum, yaitu pertentangan hukum (*conflict of norm*). menurut Peter Mahmud marzuki isu hukum



diawali karena adanya dua posisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lainnya. Isu hukum juga timbul karena adanya dua proporsi hukum yang saling berhubungan satu sama lain.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah penulis temukan di lapangan, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang “**Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang**”

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dengan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan dua permasalahan yang memerlukan jawaban pada penelitian ini.

1. Apa dasar hukum pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ?

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 57.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui landasan hukum apa yang digunakan dalam pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana hukum pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

Hasil penelitian diharapkan menghadirkan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai konsep pengalihan hutang syariah dan berbagai *design* akadnya.
  - b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga perbankan syariah.
  - b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat atau nasabah mengenai peraturan pengalihan hutang (*teke over*) di bank syariah.

- c. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi praktisi dan akademisi ekonomi syariah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan perbandingan, sehingga penulis dapat menghindari plagiarisme. Demi mendukung keorisinilan karya ilmiah, penulis akan memaparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan tema penelitian ini. Kajian tentang konsep kedudukan hukum telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk artikel, skripsi, jurnal dan karya ilmiah lainnya, namun kedudukan hukum tentang konsep pengalihan hutang di bank syariah ini belum penulis temukan di penelitian sebelumnya. Telaah pustaka ini dapat berupa hasil penelitian yang telah dibukukan yang antara lain: Muhammad Rizaldi dengan judul “Pelaksanaan *Take Over* di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan”, Drs. Zainul Arifin, MBA dengan judul buku *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* dan Dr. A. Wangsawidjaja Z.,S.H., M.H. dengan judul buku *Pembiayaan Bank Syariah*.

Untuk menghindari duplikasi, mengenai masalah *take over* di perbankan telah diteliti, hanya saja berbeda kasus dan obyek status hukum. Oleh karena itu penulis sertakan

beberapa judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini:

1. Tentang pelaksanaan *take over* di bank syariah telah penulis temukan penelitian dari Jurnal portalgaruda.org milik Muhammad Rizaldi dengan judul **“Pelaksanaan Take Over di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan”** dengan kesimpulan: bahwa dalam pembiayaan *take over* tersebut telah menggunakan akad *qard* dan *murabahah* sesuai dengan fatwa DSN MUI nomer 31 tahun 2002. Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah, dalam penelitian ini tidak membahas tentang analisis pelaksanaannya dari sisi hukum positif (UU Perbankan syariah dan turunannya).
2. Dari skripsi M. Koni Romaini Aziz dengan NIM: 104046101649 dari Program S1 Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 yang berjudul **“Analisa Perjanjian Take Over di Bank DKI Syariah”** dengan kesimpulan: bahwa dalam analisisnya mendapatkan beberapa aspek yang belum sesuai dengan aplikasi *take over* dengan teori akad pengalihan hutang (*hiwalah*), dan menerangkan prosedur pembiayaan *take over* di Bank DKI Syariah sampai dengan penyelesaian prosedur

dengan pembuatan kontrak minimal 2 rangkap (pihak bank dan nasabah).

3. Dari skripsi Abdillah Chamidun dengan NIM: 2104057 dari program S1 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2009 yang berjudul **“Studi Analisis terhadap Pelaksanaan Take Over di PT. Federal International Finance (F.I.F) Syariah Cabang Kudus”** dengan kesimpulan: bahwa dari segi subyek, akad pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) yang dilakukan di PT.FIF Syariah Cabang Kudus kurang sesuai dengan prinsip dasar *hiwalah* karena sebelumnya penerima fasilitas baru tidak mempunyai tanggungan hutang kepada pihak pertama. Meskipun demikian penerima fasilitas sebagai *muhil*, penerima fasilitas baru sebagai *muhal ‘alaih* dan pihak FIF Syariah sebagai *muhal* melakukan transaksi *take over* dengan iktikad baik tanpa paksaan dari pihak manapun dan berasaskan kebebasan berkontrak. Sedangkan dari segi obyek yakni hutang yang dialihkan (*muhal bih*), dibolehkan karena hutangnya sudah jelas dalam hal jumlah maupun waktu jatuh tempo dan tidak mengandung *gharar*. Dari segi *sighah* (akad), telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena para pihak yang

melakukan transaksi di dalam majlis dan mengucapkan kata sepakat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna sebuah aturan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang menyatakan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian bahasa jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2009) h. 207.

Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala dengan melihat pula pelaksanaannya di lapangan.<sup>7</sup>

Penelitian hukum normatif empiris disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Penelitaian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>9</sup>

Alasan menggunakan hukum normatif empiris karena penelitian ini peneliti membutuhkan data-data empiris sebagai pelengkap terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu juga menelaah bahan-bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum normatif empiris. Sebagaimana kajian dalam penelitian ini adalah

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 13.

<sup>8</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 118.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 306.

kedudukan dari fatwa DSN MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, maka pendekatan penelitian dalam jenis ini menggunakan pendekatan konsep. Konsep memiliki arti memahami, menerima dan menangkap. Salah satu fungsi konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.<sup>10</sup> Pendekatan konsep digunakan untuk memahami perbandingan regulasi pelaksanaan operasional bank syariah dari Fatwa DSN MUI Surat Edaran Bank Indonesia mengenai transaksi pengalihan hutang (*take over*).

Selain menggunakan pendekatan konsep, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun mengenai pendekatan ini, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>11</sup> Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan karena meneliti aturan mengenai konsep

---

<sup>10</sup> Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 306.

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 92.



pengalihan hutang yang ada di Fatwa DSN MUI No. 31 Th. 2002 dan juga pengalihan hutang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 14/ DPbS.

Pendekatan penelitian yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan lapangan. Di mana penulis meneliti bagaimana pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dan bagaimana kedudukan kedua regulasi tentang pengalihan hutang dalam hal ini adalah kedudukan Fatwa DSN MUI dan Surat Edaran Bank Indonesia.

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, sehingga membutuhkan dua macam sumber data dalam penelitian skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian, dua sumber data tersebut adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>12</sup>

Dalam hal ini alat pengambil data yang digunakan

---

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) h. 91.

yaitu dengan wawancara secara langsung yang ditujukan kepada pihak Bank Jateng Syariah Semarang, serta bahan buku primer yang terdiri atas perundang-undangan dan risalah-risalah tentang akad pengalihan hutang dalam Islam juga buku-buku tentang fiqh muamalah lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>13</sup> Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Seperti hasil informasi dan wawancara dari media berupa tulisan, video dan rekaman suara juga studi kepustakaan terkait dengan undang-undang atau sumber hukum lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat normatif empiris, maka diperlukan pengumpulan data dengan berbagai metode yakni dengan pengumpulan data secara langsung dari lapangan dan juga studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

a. Metode Wawancara

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Ibid*, h. 92

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber<sup>14</sup> yaitu pihak Bank Jateng Syariah Cabang Semarang. Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan). Wawancara dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis.

Adapun bentuk wawancara yang dilakukan yaitu *Pertama* wawancara semi terstruktur diajukan kepada pimpinan Cabang Bank Jateng Syariah Semarang, Bentuk wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi.<sup>15</sup> *Kedua* wawancara tidak terstruktur diajukan kepada pihak terkait yakni Bank Jateng Cabang Syraiah Semarang, baik karyawan maupun nasabah *take over*. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan pengalihan hutang di bank syariah.

---

<sup>14</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989) h. 46.

<sup>15</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika. 2012) h. 123-124.

#### b. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “*mateng*” (jadi) dan disebut data sekunder.<sup>16</sup> Misalnya surat kabar, catatan harian, laporan atau berita, rekaman video, buku-buku dan artikel lainnya.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif-analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.<sup>17</sup> Adapun analisis yang akan dilakukan yaitu tentang apa yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dan bagaimana pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Adi Rianto, *Op. Cit*, h. 61.

<sup>17</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995) h. 67.

pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penelitain ini, maka dibutuhkan sistematika penulisan, yang mana sistematika penulisan dipaparkan dalam lima bab sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan.

### **BAB II : KONSEP UMUM PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DAN REGULASINYA DI INDONESIA**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu konsep umum tentang pengalihan hutang dalam konsep Islam yakni (*hiwalah*). Kemudian menelaah konsep teori hukum positif tentang pengalihan hutang (*take over*) di UU

Perbankan Syariah, PBI (Peraturan Bank Indonesia), SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) sekaligus meleaah konsep regulasi hukum syariah melalui Fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang (*take over*).

### **BAB III:PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG DI BANK JATENG SYARIAH SEMARANG**

Yaitu memaparkan praktik pengalihan hutang di Bank Jateng Syariah Semarang. Dalam bab ini terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang Bank Jateng Syariah Semarang. Dilanjutkan dengan praktik pengalihan hutang di Bank Jateng Syariah Semarang, hingga menjelaskan berdasarkan data-data yang ada tentang apa yang terjadi dalam praktik pengalihan hutang tersebut dan tidak lepas mengetahui apa landasan hukum yang digunakan oleh bank tersebut dalam operasinalnya.

### **BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG DI BANK JATENG CABANG SYARIAH SEMARANG**

Yaitu analisis terhadap praktik pengalihan hutang dilaksanakan di Bank Jateng Syariah Semarang dengan berbagai *design* akadnya. Kemudian analisis terhadap penggunaan landasan operasionalnya terkait dengan penggunaan Fatwa DSN MUI juga UU Perbankan Syariah, PBI dan SEBI. Lalu bagaimana kedudukan kedua regulasi tersebut di mata hukum juga bagaimana kedudukan kedua regulasi tersebut bagi Bank Jateng Syariah Semarang.

## **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi yang penulis buat.

## **BAB II**

### **KONSEP UMUM PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) DAN REGULASINYA DI INDONESIA**

#### **A. Pengalihan Hutang dalam Islam (*Hiwalah*)**

##### **1. Pengertian Pengalihan Hutang (*Hiwalah*)**

Transaksi perniagaan yang berkembang di tengah masyarakat semakin beragam. Seiring dengan berkembangnya polemik perniagaan, maka bermunculan pula ketentuan transaksi yang semakin rumit, tidak sederhana jual beli klasik, atau bahkan sistem barter jaman dahulu. Begitu juga dalam hal hutang-piutang, bukan hanya hutang-piutang sederhana sederhana *qard*, atau hutang yang dibayar secara cicilan. Dalam akad muamalah ada akad pengalihan hutang, yakni *hiwalah*.

Secara bahasa, pengalihan hutang dalam hukum Islam disebut sebagai *hiwalah* yang mempunyai arti lain yaitu *Al-intiqal* dan *Al-tahwil*, artinya memindahkan dan mengalihkan. Penjelasan yang dimaksud adalah memindahkan hutang dari tanggungan *muhil* (orang yang berhutang) menjadi



tanggungan *muh'al'alaih* (orang yang melakukan pembayaran hutang).<sup>1</sup>

لغة : النقل من محل إلى محل

Sedangkan pengertian *hiwalah* secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

Menurut Hanafi, yang dimaksud *hiwalah*

نقل المطالبة من ذمة المدين إلى ذمة الملتزم<sup>2</sup>

“Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab pula”.

Al-jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* adalah

نقل الدين من ذمة إلى ذمة<sup>3</sup>

“Pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain”.

Syihab al-din al-qalyubi bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* adalah

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 99.

<sup>2</sup> Ali Jum'ah Muhammad, dkk. *Mausu'ah Fatawa al-Muamalat al-Maliyah Lilmasyarif wa al-muassaat al-Maliyah, al-Islamiah, al-Murabahah*, jilid 13, Kairo, Dar al-Salam Lithaba'ah wa al-Tauzi' wa al-Tarjamah, 2009, h.11.

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, (Mesir al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 210.

عقد يقتضى انتقال دين من ذمة إلى ذمة<sup>4</sup>

*“Akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain”.*

Muhammad Syatha al-dimyati berpendapat bahwa yang dimaksud *hiwalah* adalah

عقد يقتضى تحويل دين من ذمة إلى ذمة

*“Akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain”.*

Ensiklopedi Hukum Islam, di dalamnya dijelaskan *hiwalah* adalah Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang atau membayar utang dari atau kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Huhaily, *Al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, (Damsyiq: Dar al-Fikri 1989), h. 162.

pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak didasarkan kesepakatan bersama.<sup>5</sup>

Dalam konsep hukum perdata Indonesia (BW/ KUH Perdata), *hiwalah* dipresepsikan dengan lembaga pengambilalihan hutang (*schuldoverneming*), atau lembaga pelepasan hutang atau penjualan hutang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditur atau penggantian debitur. Dalam hukum perdata, dikenal lembaga yang disebut subrogasi<sup>6</sup> dan novasi<sup>7</sup>, yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya penggantian kreditur dan debitur.

## 2. Dasar Hukum Pengalihan Hutang (*Hiwalah*)

Pengalihan hutang atau disebut juga dengan *hiwalah* dibenarkan dalam Islam berdasarkan sunnah dan ijma'.

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997). h. 559

<sup>6</sup> **Subrogasi** ini diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata. Disebutkan dalam pasal tersebut **subrogasi adalah** penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. **Subrogasi** dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang.

<sup>7</sup> **Novasi** atau pembaruan utang merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan. **Novasi** dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur, maupun obyek perikatan.

## a. Hadis

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (متفق عليه)

“Dari Abu Huraira R.A berkata bahwa Nabi Muhammad S.A.W bersabda: *Memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (diterima pengalihan tersebut)*”. (HR Al-Bukhori)<sup>8</sup>

Pada hadits ini Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng*hiwalahkan* kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang di*hiwalahkannya*

---

<sup>8</sup> Mukhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, editor : Mustafa Daib al-Bigha (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987 M/ 1407 H) h. 799

(*muhal'alaih*), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).<sup>9</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah yang terdapat pada hadits di atas (*fat yatba'* atau *fat ba'hu*) adalah perintah yang bersifat sunnah dan anjuran. Oleh karena itu, tidak wajib hukumnya untuk menerima akad *hiwalah*. Namun, Abu Daud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perintah dalam hadits tersebut adalah bersifat wajib, oleh karena itu wajib bagi pihak *muhal* untuk menerima *hiwalah* tersebut.<sup>10</sup>

b. *Ijma'*

Selain hadist Nabi, terdapat kesepakatan ulama yang membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena *hiwalah* adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial.

3. Macam-Macam Pengalihan Hutang (*Hiwalah*)

Ada beberapa istilah dalam pembagian jenis *hiwalah*. Ditinjau dari segi objek akad, *hiwalah* dapat

---

<sup>9</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 284-285.

<sup>10</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 6, terj-Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 84

dibagi menjadi dua, yaitu apabila yang dipindahkan merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah al-haqq* (pemindahan hak). Sedangkan jika yang dipindahkan adalah kewajiban untuk membaya hutang, maka disebut dengan *hiwalah ad-dain* (pemindahan hutang).<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis membahas *hiwalah* dalam hal pemindahan kewajiban membayar hutang.

*Hiwalah ad-dain* ada dua pula, yaitu memindahkan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua disebut *hiwalah al-muqayyadah* (pemindahan bersyarat). Kemudian ada pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua disebut dengan *hiwalah al-muthlaqah* (pemindahan mutlak).<sup>12</sup>

*Hiwalah muthlaqah* terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Jika A berhutang kepada B

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdaeni, *Perbankan Syariah : Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 384.

<sup>12</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani, 2001) h. 67.

dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang piutang kepada B, maka *hiwalah* ini disebut *hiwalah muthlaqoh*. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan Syi'ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis *hiwalah* ini sebagai kafalah.

*Hiwalah muqoyyadah* terjadi jika *muhil* mengalihkan hak penagihan *muhil* kepada *muhil alaih* karena yang terakhir punya hutang kepada *muhil*. Inilah *hiwalah* yang boleh (*jaiz*) berdasarkan kesepakatan para ulama.<sup>13</sup>

Ketiga madzhab selain madzhab hanafi (mahdzah Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa hanya membolehkan *hiwalah muqayyadah* dan menyariatkan pada *hiwalah muqayyadah* agar hutang *muhil* kepada *muhil* dan hutang *muhil alaih* kepada *muhil* harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama jenis dan jumlahnya, maka sahlah *hiwalahnya*. Tetapi jika salah satunya berbeda, maka *hiwalah* tidak sah.

Seiring dengan konsep transaksi ekonomi yang semakin berkembang, muncul pula jenis *hiwalah* yang baru, yang masuk dalam akad *profit*,

---

<sup>13</sup> Rozalinda, *op.cit.* h. 173.

bukan lagi akad *tabarru'* yakni *hiwalah bil ujroh*. *Hiwalah bil ujroh* adalah *hiwalah* dengan pengenaan *ujrah* atau *fee*. *Hiwalah bil ujrah* hanya berlaku pada *hiwalah muthlaqah*. Dalam *hiwalah muthlaqah muhal alaih* boleh memperoleh *ujrah* atau *fee* atas kesediannya untuk membayar hutang *muhil*. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan pada pihak. Ketentuan mengenai *hiwalah bil ujrah* telah disepakati oleh para ulama modern dan telah tercantum dalam fatwa DSN MUI nomor 58 tahun 2007 tentang *hiwlaah bil ujroh*.

#### 4. Rukun dan Syarat Pengalihan Hutang (*Hiwalah*)

Dalam sebuah perjanjian dalam Islam (akad), terdapat rukun dan syarat yang menjadikan akad itu hahal menurut agama. Tidak terkecuali akad pengalihan hutang.

Syarat *hiwalah* dari Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

- a) Relanya pihak *muhil* dan *muhal* tanpa adanya *muhal 'alaih*, jadi yang harus rela itu adalah *muhal* dan *muhil* Bagi *muhal 'alaih* rela atau tidak rela,



tidak akan mempengaruhi kesalahan *hiwalah*.

- b) Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas, dan kuantitasnya.
- c) Stabilitasnya *muhal 'alaih*, maka peng*hiwalahan* kepada seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal.
- d) Hak tersebut diketahui secara jelas.

Menurut Malik, perpindahan hutang itu mempunyai tiga syarat:

- a) Orang yang dipindahkan hutangnya itu sudah jatuh tempo.
- b) Utang yang dipindahkan itu sama dengan hutang yang baru dalam kadar dan sifatnya.
- c) Hutang tersebut bukan dari pesanan.

Persyaratan *hiwalah* ini berkaitan dengan Muhil, Muhal, Muhal Alaih dan Muhal Bih. Persyaratan yang berkaitan dengan Muhil, ia disyaratkan harus, berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak). Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia

berakal dan baligh. *Hiwalah* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil karena tidak bisa atau belum dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum. Kedua, kerelaan Muhil. Ini disebabkan karena *hiwalah* mengandung pengertian kepemilikan sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. Di samping itu persyaratan ini diwajibkan para fukoha terutama untuk meredam rasa kekecewaan atau ketersinggungan yang mungkin dirasakan oleh Muhil ketika diadakan akad *hiwalah*.

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal. *Pertama*, Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Muhil. *Kedua*, kerelaan dari Muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan. *Ketiga*, ia bersedia menerima akad *hiwalah*.

Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal Alaih. *Pertama*, sama dengan syarat pertama bagi Muhil dan Muhal yaitu berakal dan baligh. *Kedua*, kerelaan dari hatinya karena tidak boleh dipaksakan. *Ketiga*, ia menerima akad *hiwalah* dalam majlis atau di luar majlis. Pendapat yang rajih (valid) adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan muhal ‘alaih. Dan muhal

‘alaih akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya.

Persyaratan yang berkaitan dengan *Muhal Bih*. Pertama, ia harus berupa hutang dan hutang itu merupakan tanggungan dari *Muhil* kepada *Muhal*. Kedua, hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan.

Menurut Imam Hanafi, rukun *hiwalah* ialah adanya *ijab* (pernyataan melakukan pengalihan hutang) dari pihak pertama, dan adanya *qabul* (pernyataan menerima pengalihan hutang) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Sementara itu, menurut *mahdzab maliki*, *Syafi’i* dan *Hanbali* rukun *hiwalah* ada enam yakni : *muhil*, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang; *muhal* yakni orang berpiutang kepada *muhil*; *Muhal ‘alaih*, yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhal*; *muhal bih 1*, yakni hutang *muhil* kepada *muhal*, dan juga; *muhal bih 2* sebagai hutang *muhal alaih* kepada *muhil*; *sighat* (*ijab-qabul*).

Untuk syarat sahnya *hiwalah*, disyaratkan beberapa hal. Seperti, relanya pihak *muhil*, dan *muhal*

tanpa *muhal'alaih*. *muhil* yang berhutang berkewajiban membayar hutang dari arah mana saja yang sesuai dengan keinginannya, karena *muhal* mempunyai hak yang ada pada tanggungan *muhil*, maka tidak mungkin terjadi perpindahan tanpa kerelaannya. *Kedua*, samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian, tempo waktu, serta mutu baik dan buruk. Maka tidak sah *hiwalah* apabila hutang berbentuk emas dan di-*hiwalah*-kan agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Demikian pula jika sekiranya hutang itu sekarang dan di-*hiwalah*-kan untuk dibayar kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya. Tidak sah *hiwalah* yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak. *Ketiga*, stabilnya hutang. Jika peng*hiwalahan* itu kepada pegawai yang gajinya belum lagi dibayar, maka *hiwalah* tidak sah. *Keempat*, kedua hak tersebut diketahui dengan jelas. Apabila *hiwalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggungan *muhil* menjadi gugur. Apabila *muhal'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, *muhal* tidak boleh kembali kepada *muhil*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdaeni, *op.cit.* h. 385.

## B. Pengalihan Hutang (*Take over*) dalam Perbankan

### 1. Pengertian Pengalihan Hutang (*Take Over*)

Pengalihan Hutang dalam perbankan sering disebut dengan *Take over*, menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia bermakna mengambil alih.<sup>15</sup> *Take over* adalah pengambilalihan atau dalam ruang lingkup perusahaan adalah perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan.<sup>16</sup> Menurut Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *take over* selain mempunyai pengertian perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan, juga memiliki pengertian lain yaitu pengambilalihan sebuah perusahaan oleh perusahaan lain.<sup>17</sup>

Dari beberapa pendapat umum di atas mengenai *take over*, dapat sedikit tergambarkan *take over* yang dilakukan dalam lingkup dunia usaha (bisnis). Dalam penelitian kali ini, *take over* yang dimaksud peneliti adalah *take over* dalam lingkup perbankan, atau disebut juga dengan pengalihan hutang. Dalam dunia perbankan syariah istilah pengalihan hutang (*take over*) telah dibahas

---

<sup>15</sup> John M Echols dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990) h. 578.

<sup>16</sup> Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Gitamedia press, 2003), h. 331.

<sup>17</sup> Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara , 2005), h. 231.

dalam Surat Edaran Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI Nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang.

Peralihan kredit (*take over*) merupakan istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang atau kredit debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan debitur awal. Peristiwa pengalihan hutang ini identik dengan peristiwa subrogasi. Sesuai pasal 1400 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Peristiwa yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga.<sup>18</sup>

Pengalihan hutang (*take over*) merupakan salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu

---

<sup>18</sup> Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)* (Jakarta: Pradnya Pramita, 2003). h. 213

masyarakat rnengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah.<sup>19</sup> Dalam hal ini, bank syariah mengambil alih hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau menggunakan *qard* yang disesuaikan dengan ada tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional.

Dalam pembiayaan berdasarkan *take over*, bank syariah mengklasifikasikan hutang kepada bank konvensional menjadi dua macam, yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Dalam menangani hutang nasabah berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qard* (pinjaman uang). Karena alokasi penggunaan *qard* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga maka dalam penalangan hutang ini menggunakan akad *qardh*. Sedangkan yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa *hiwalah* (alih hutang piutang) karena *hiwalah* tidak bisa untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Dengan demikian dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan

---

<sup>19</sup> Ahmad Antoni K Muda. *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Press, 2003) h. 331

pembiayaan yang diajukan nasabah ke dalam dua kategori, yakni pembiayaan *take over* atau *nontake over*.

Dalam proses *take over*, bank syariah bertindak sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional. Bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang (yang dikreditkan) menjadi milik nasabah secara utuh.<sup>20</sup> Selanjutnya, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali (barang yang dikreditkan) tersebut kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual rumah tersebut lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam fatwa DSN-MUI/VI/2002 nomor 31 tentang pengalihan hutang seperti *qardh* dan *murabahah*, *syirkah al-milk* dan *murabahah*, *qardh* dan *ijarah* serta *qardh* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Apabila diperhatikan, *take over* di sini dapat digolongkan sebagai akad *hiwalah muthlaqah*, yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada pihak lain,

---

<sup>20</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006) h. 248.



tanpa mengaitkannya pada hutang *muhal* 'alaih padanya. *Hiwalah* jenis ini, tidak semua ahli fiqh membolehkannya sebagai mana penjelasan sebelumnya.

## 2. Tujuan Pengalihan Hutang (*Take Over*)

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *take over*. Di sini bank berusaha untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memindahkan transaksi hutang nya yang telah berjalan beralih ke transaksi hutang yang sesuai syariah. *take over* bertujuan untuk membatu mengalihkan transaksi non syariah menjadi transaksi yang sesuai syariah.

### C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Indonesia

#### 1. Landasan Hukum Positif Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*)

Pengesahan UU perbankan syariah telah melahirkan secercah harapan dalam sejarah perbankan di Indonesia. Dengan adanya UU perbankan syariah, eksistensi perbankan syariah sebagai pelaku ekonomi nasional mendapatkan pijakan yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Dalam Peraturan Perundangan yang menjadi payung hukum Perbankan di Indonesia, disebutkan bahwa semua bank baik konvensional maupun syariah yang beroperasi di Indonesia berada di bawah pengawasan dan

pembinaan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral, namun semenjak tahun 2011 telah beralih tugas pengawasan Lembaga Keuangan yang awalnya menjadi pengawasan BI beralih ke pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurus sistem keuangan syariah di Indonesia, BI perlu menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum syariah. Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan dalam nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut, keberadaan DSN-MUI menjadi penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah negeri ini.

Dalam operasionalnya, kegiatan usaha perbankan syariah dan atau produk dan jasa syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah (Pasal 26 UU Perbankan Syariah). Untuk mengimplementasikan landasan yuridis tersebut, maka BI menjalin MOU dengan MUI dalam meregulasi operasional Bank Syariah. MUI sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia kemudian mengeluarkan fatwa Dewan Syariah

Nasional MUI yang nantinya menjadi rujukan khususnya bagi kegiatan usaha bank syariah. Fatwa DSN-MUI tersebut kemudian direkomendasikan ke BI karena telah ada kerja sama antara kedua lembaga tersebut. Kemudian BI membentuk Komite Perbankan Syariah untuk merumuskan Peraturan Bank Indonesia yang beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang (Pasal 26 ayat 4). PBI yang terbentuk tersebut dilimpahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah dan BPR agar dijadikan landasan dan rujukan dalam kegiatan usaha, produk, serta jasa yang ada dalam bank syariah. Untuk mengawasi dan mengefektifkan kinerja bank syariah dalam menjalankan transaksi yang berlandaskan syariah, maka DSN-MUI juga menginstruksikan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan surat rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syariah. Tujuan pembentukan DPS adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan dengan bekerja

sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bank sentral dan lembaga otoritas yang mengawasi melindungi dan mengatur operasional bank di Indonesia agar tercipta iklim keuangan yang kondusif, meningkatkan geliat perekonomian nasional dan bagi IB (*Islamic Bank*) dapat benar-benar eksis menjadi lembaga keuangan yang memegang teguh prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dijalankan.

Pengalihan hutang (*take over*) sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa, telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *hiwalah* atau pengalihan hutang mendapat dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain meliputi melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad *hiwalah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad *hiwalah* secara teknis berdasarkan kepada PBI

(Peraturan Bank Indonesia) No. 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/ 16/ PBI/ 2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad *hiwalah*, *kafalah* dan *sharf*.

Lebih rinci lagi, praktik pengalihan hutang (*take over*) dijelaskan Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 14/ DpBS Perihal Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan jasa Bank Syariah pada poin IV.2. dijelaskan lebih rinci mengenai mekanisme pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah*.

Landasan hukum selanjutnya adalah DSN MUI telah menerbitkan fatwa No. 31/ DSN-MUI/ VI/ 2008 tentang Pengalihan Hutang. Istilah lain untuk pengalihan hutang dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah *hiwalah*.

## 2. Konsep Pengalihan Hutang (*Take Over*) dalam Fatwa DSN-MUI

Dewan syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan di seluruh

dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DSN MUI mulai ada pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/ II/ 1999 tanggal 10 Februari 1999.<sup>21</sup>

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian oprasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) yang kemudian sekarang ini beralih ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya secara penuh di bidang syariah, maka munculah gagasan untuk dibentuknya Dewan Syariah Nasional.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Baik masalah ekonomi syariah yang

---

<sup>21</sup> M. Ichwan Sam dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*, ( Jakarta : Erlangga 2014) hal. 4

berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Selain itu DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Keberadaan DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan pada saat itu. Legitimasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999. Pada pasal 31 dinyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN”. Lebih lanjut, dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan: “demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”.

Adapun mekanisme kerja dewan syariah nasional adalah sebagai berikut :

- a. DSN mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN
- b. DSN melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Mekanisme penyerapan fatwa DSN sebagai regulasi lembaga keuangan syariah, diatur dalam Pasal 26 UUPS No. 21 Tahun 2008 yaitu :

- a. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, dan/atau produk jasa syariah wajib tunduk pada Prinsip Syariah.
- b. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- c. Fatwa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- d. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.



- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.<sup>22</sup>

Terkait dengan salah satu produk jasa di bank syariah yaitu pengalihan hutang (*take over*) sebagaimana gambaran umum lembaga DSN MUI yang telah dijelaskan di atas, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa tentang transaksi pengalihan hutang (*Take over*) yang diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang.

Ketentuan umum dalam fatwa nomor 31 tahun 2002, yang dimaksud dengan pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional beralih ke bank syariah. Dalam ketentuan umum ini dikenal juga *al-qardh* adalah akad pinjaman dari LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktunya dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. Yang dimaksud nasabah adalah calon nasabah LKS yang

---

<sup>22</sup> Ibid M. Ichwan Sam dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*. h. 5.

mempunyai kredit (hutang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit (hutang) kepada LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.<sup>23</sup>

Dalam fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang, akad yang digunakan untuk transaksi ini dapat melalui empat alternatif berikut :

a. Alternatif I

- 1) LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)nya, dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك)
- 2) Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
- 3) LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-*Qardh* dan Fatwa DSN nomor:

---

<sup>23</sup> Ibid M. Ichwan Sam dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)* h. 180.

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

b. Alternatif II

- 1) LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
- 2) Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan utang (siswa cicilan) nasabah kepada LKK.
- 3) LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

c. Alternatif III

- 1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh (المالك التام) atas aset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS, sesuai

dengan fatwa DSN MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.

- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat menalangi kewajiban nasabah kepada LKK untuk melunasi kreditnya dengan menggunakan prinsip prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001
- 3) Akad ijarah sebagaimana dimaksud angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksud angka 2.
- 4) Besar imbalan jasa ijarah sebagaimana dimaksud angka 1 tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan pada angka 2.

d. Alternatif IV

- 1) LKS memberikan akad *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang) kepada LKK. Dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام).
- 2) Nasabah menjual asetnya kepada LKS, dengan begitu nasabah melunasi *qardh* nya kepada LKS dengan uang hasil penjualan tersebut.

- 3) LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya itu kepada nasabah dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
- 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.<sup>24</sup>

Penetapan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pengalihan tentang hutang ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 15 rabi'ul akhir 1423 H/ 26 Juni 2002.

3. Konsep Pengalihan Hutang (*Take Over*) dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DpBS 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengawasi dan membina semua bank yang berbadan hukum di Indonesia atau beroperasi di Indonesia. Dalam hierarki

---

<sup>24</sup> *Ibid* M. Ichwan Sam dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)* h. 180-182.

hukum nasional yang terdiri dari UUD, UU, Perpu, PP, Perpres dan perda. PBI tidak disebutkan secara gamblang dalam status hierarki hukum Indonesia seperti perundang-undangan di atas, namun dalam pasal 7 ayat (4) UU No. 10 tahun 2004 ditegaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan lembaga lain seperti Bank Indonesia yang bersifat mengatur mempunyai kekuatan hukum selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini oleh UUD, UU, Perpu, dan Perpres.<sup>25</sup> Dengan begitu, peraturan lembaga negara seperti PBI, tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus merujuk atau melaksanakan perintah dari salah satu hierarki hukum di atas.

Pasal 56 UU No. 10 tahun 2004 memberikan pengecualian bahwa ketentuan yang bersifat mengatur yang dikeluarkan pejabat negara sebelum pemberlakuan UU No. 10 tahun 2004 1 November 2004, tetap berlaku dan berkekuatan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan UU di atas (pasal 56 UU No. 10 tahun 2004). UU No. 10 tahun 2004 mulai berlaku pada 1 November

---

<sup>25</sup> UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan dikutip dari Lembaran Negara Tahun 2004 No. 53 sebagaimana dimuat dalam [http://www.parlemen.net/site/docs/UU\\_NO\\_10\\_2004.pdf](http://www.parlemen.net/site/docs/UU_NO_10_2004.pdf).

2004 (pasal 58 UU No 10 tahun 2004).<sup>26</sup> Dengan ketentuan tersebut, PBI yang lahir sebelum 1 November 2004 tetap mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan PBI yang lahir setelah 1 November 2004 harus menyesuaikan ketentuan dalam UU No 10 tahun 2004. Proses kelahiran PBI harus ada perintah dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 4 UU No. 10 tahun 2004. Oleh karena itu dalam UU terdapat bunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai hal tertentu diatur dalam PBI).

Melalui lembaran negara RI nomor 182 tanggal 10 November 1998, disahkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang ini ketentuan perihal bank syariah semakin tegas. Oleh sebab itu PBI yang mengatur perbankan syariah juga semakin kuat, karena diperintahkan oleh UU yang secara khusus mengatur perbankan syariah. Dalam UU perbankan syariah ada beberapa pasal yang memerintahkan “ketentuan lebih lanjut mengenai hal tertentu diatur dalam PBI”.

Setelah PBI menjadi pelaksana Undang-Undang, dalam hierarki hukum di Indonesia terdapat turunan dari

---

<sup>26</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah : Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 23.

PBI sebagai penjelas teknis pelaksanaan. Adalah Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), merupakan regulasi yang berisi ketentuan pelaksanaan PBI yang lebih detail dalam ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Pelaksanaan Pengalihan hutang sebagai salah satu produk jasa dan layanan bank syariah diatur ketentuan pelaksanaanya dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 14/ 14/ DpBS. Di amna sehubungan dengan diterbitkanya Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 No. 165, tambahan lebaran negara republik Indonesia no. 4793), perlu diatur ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagaimana terlampir.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) untuk semua bank syariah di Indonesia, perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah yang diterbitkan pada 17 maret 2008 menerangkan tentang pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah*. Pada poin IV.2. diterangkan :



1) Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah* terdiri dari :

- a) *Hiwalah mutlaqah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan hutang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*) bank, dan
- b) *Hiwalah muqayyadah* adalah transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang diantara 3 pihak yang memiliki hubungan muamalat (utang-piutang) melalui transaksi pengalihan hutang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar dari bank.

2) Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah mutlaqah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a) Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan hutang atas hutang nasabah kepada pihak ketiga;
- b) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan hutang

atas dasar akad *hiwalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan dana pribadi nasabah;

- c) Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah* bagi nasabah yang abatara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan atau aspek usaha anantara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*) dan prospek usaha (*condition*);
- d) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah*;
- e) Nilai pengalihan hutang harus sebesar nilai nominal;

- f) Bank menyediakan dana talangan (*qardh*) sebesar nilai pengalihan hutang nasabah kepada pihak ketiga;
  - g) Bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* dalam batas kewajaran kepada nasabah.
- 3) Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah muqayyadah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
- a) Ketentuan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar kad *hiwalah muthlaqah* sebagaimana dimaksud pada poin b, kecuali angka 2, kecuali angka 1,6 dan 7;
  - b) Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan hutang atas hutang nasabah kepada pihak ketiga, di mana sebelumnya bank memiliki hutang kepada nasabah; dan
  - c) Jumlah hutang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai hutang.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) DI BANK JATENG CABANG SYARIAH SEMARANG**

### **A. Profil Bank Jateng Syariah**

#### **1. Sejarah Bank Jateng Syariah**

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau yang sekarang dikenal dengan Bank Jateng ini berdiri pada tahun 1963 berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah beroperasi untuk pertama kali pada tanggal 6 April 1963, bertempat di Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai kantor pusat.

Pada tahun 1969, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969. Kemudian melalui

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda). Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akta pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan sebagai Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan perusahaan, untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen mengubah logo dan nama sebutan

---

<sup>1</sup> [www.bankjateng.co.id](http://www.bankjateng.co.id)

(*callname*) perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (*callname*) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.<sup>2</sup>

Bank Jateng Syariah merupakan unit bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008, berkantor pusat di Kota Semarang yaitu di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang. Pada awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan mulai beroperasi pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan tahun 2016, Bank Jateng Syariah telah mengoperasionalkan 4 Kantor Cabang Syariah, 9

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Kantor Cabang Pembantu Syariah, 1 Payment Point, 3 Kantor Kas Syariah, 131 Layanan Syariah (*Office Chanelling*) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah dan 4 ATM.<sup>3</sup> Selain itu, nasabah Bank Jateng Syariah juga dapat melakukan transaksi tarik-setor rekening tabungan di Seluruh Kantor Cabang, baik Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas Bank Jateng di seluruh wilayah Jawa Tengah. Di samping kemudahan akses layanan dimaksud, beragam produk dan jasa keuangan perbankan dengan prinsip syariah juga dapat dinikmati oleh nasabah, baik produk pembiayaan, pendanaan maupun jasa lainnya dengan fitur dan layanan yang sangat bersaing.

## 2. Visi dan Misi Bank Jateng Syariah<sup>4</sup>

### 1) Visi

Menjadi bank syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Penjelasan visi dijabarkan dalam beberapa aspek:

---

<sup>3</sup> Materi yang disampaikan oleh Pimpinan Cabang Bank Jateng Syariah (Bapak Bambang Ristianto) saat penyerahan magang pada tanggal 4 Januari 2016

<sup>4</sup> Buku Profil Bank Jateng Syariah

- 1) Bank Terpercaya: Kami memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi lembaga keuangan yang diyakini berintegrasi tinggi, memiliki reputasi paling baik, paling kuat, paling aman dan paling menguntungkan.
- 2) Menjadi Kebanggaan Masyarakat: Kami memiliki keinginan yang kuat agar masyarakat merasa ikut memiliki dan menjadikan Bank Jateng sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan jasa perbankan dimanapun kami berada.

## 2) Misi

- 1) Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba Bank Jateng.
- 2) Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional.



- 3) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis.
- 4) Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya.

### 3. Data Lembaga Bank Jateng Syariah

- a. Nama Unit Usaha : Bank Jateng Syariah
- b. Kantor Pusat : Gedung Grinatha Lt. IV, Jl.  
Pemuda No.142 Semarang  
Telepon : (024) 3554025, (024)  
3547541 Pass  
: 410, 411, 416  
Fax : (024) 3554016  
Website : [www.bankjateng.co.id](http://www.bankjateng.co.id)  
Email : [sekretariat@bankjateng.co.id](mailto:sekretariat@bankjateng.co.id)  
Didirikan : 28 April 2008
- c. Kantor Cabang  
Cabang Surakarta : Jl. Slamet Riyadi No. 236  
Surakarta  
Telepon : (0271) 623412, 634206, 654036

Fax : (024) 668915

Cabang Semarang: Gedung Grinatha Lt. 3, Jl.  
Pemuda No. 142 Semarang

Telepon : (024) 3554025 password  
374,414

Fax : (024) 3566987

Cabang Purwokerto : Jl. Overste Isdiman No.  
532A Purwokerto

Telp/fax : (0281) 63067

Cabang Pekalongan : Jl. Aloon-Aloon No.1  
Pekalongan.

Telp : (0285) 411929, 423283,  
425290, 425291, 423447. Fax : (0285) 411930

#### 4. Profil Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah-nasabah Bank Jateng Syariah di ibu kota Jawa Tengah, pada tanggal 12 Maret 2010 telah dibuka Kantor Cabang Syariah di Semarang yang berlokasi di Gedung Grinatha Lantai III, Jl. Pemuda No.142 Semarang. Adapun secara struktural Bank Jateng Cabang Syariah Semarang merupakan Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Jateng. Artinya penentuan kebijakan yang diambil oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang mengacu pada

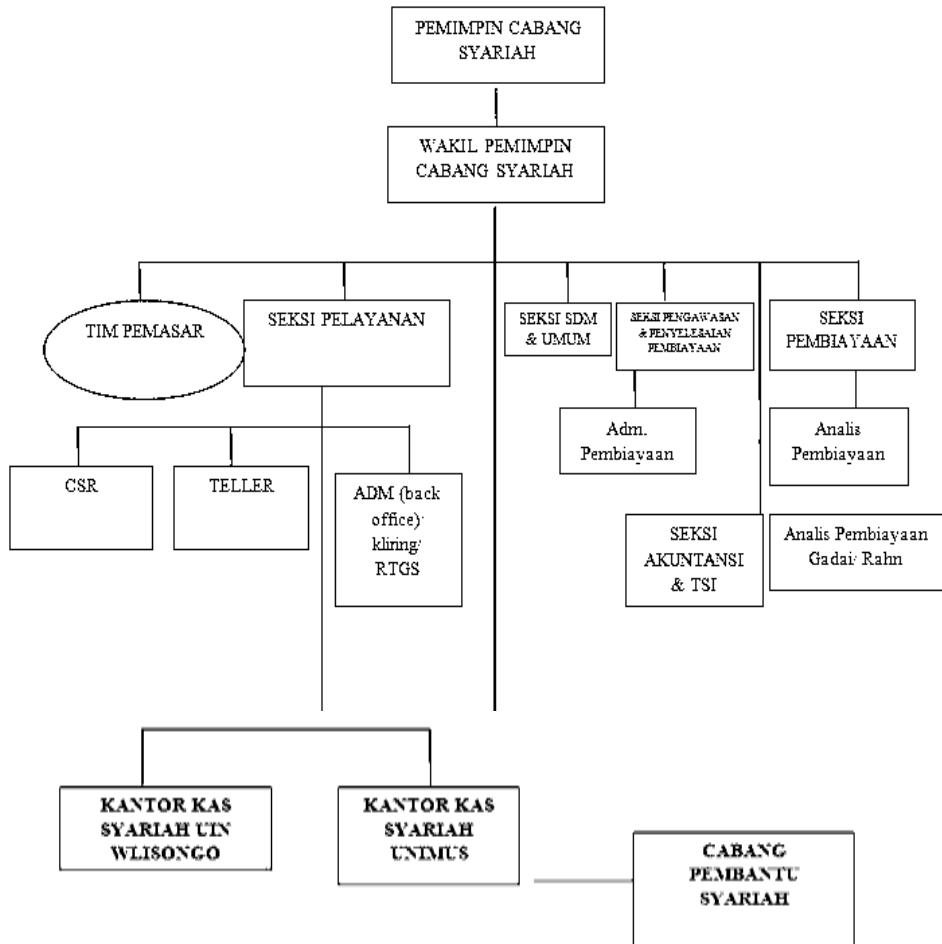
aturan yang telah dibuat oleh direksi Unit Usaha Syariah Bank Jateng.

Untuk menjalankan kegiatannya, Bank Jateng Cabang Syariah Semarang membentuk kepengurusan dengan *job description* yang jelas dan profesional. Sebagaimana Lembaga Keuangan Syariah lainnya, Bank Jateng Cabang Syariah Semarang juga terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai konsultan dalam menjalankan kegiatannya agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan syariah tersebut menjadi penasihat dalam pengeluaran produk dan memberikan fatwa atas apa yang seharusnya dilakukan oleh Bank Jateng Syariah Cabang Semarang. Eksistensi DPS menjadi sangat penting karena akan selalu memonitor jalanya operasional Bank Jateng Cabang Syariah Semarang secara intensif dan berkala. DPS terdiri dari ulama dan professional. Hal ini dimaksudkan agar DPS mampu mengawasi secara komprehensif baik dari segi hukumnya maupun dari segi profesionalitas usaha, sehingga menjadikan kinerja Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menjadi terkontrol.

Selanjutnya dibentuk pula struktur organisasi Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Struktur yang

terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaan. Setiap unsur-unsur harus dirancang dan ditaati sebaik-baiknya, sebagai pertimbangan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kejelasan dari struktur ini didapat dalam satu organisasi dan dapat diketahui hubungan kerjanya secara fungsional antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Berikut gambaran stuktur organisasi Bank Jateng Cabang Semarang.



##### 5. *Job Descreption* Struktur Organisasi Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Sesuai dengan gambaran bagan struktur organisasi Bank Jateng Cabang Syariah di atas, Bank Jateng Syariah Semarang dipimpin oleh seorang

pemimpin cabang. Pemimpin cabang memiliki kewenangan untuk memimpin, mengelola, mengawasi, mengendalikan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang pembantu yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya pemimpin cabang dibantu oleh wakil pemimpin cabang syariah. Di mana tugas dan wewenangnya hampir sama dengan pemimpin cabang, hanya saja porsi kewenangnya saling melengkapi antara pemimpin dan wakil pemimpin cabang.

Dalam operasionalnya terdapat beberapa divisi-divisi di bawah pemimpin cabang dan wakilnya yaitu :

a. Tim Pemasar

Adalah tim yang berfungsi melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di tim pemasar Syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan mensosialisasikan produk Bank Jateng

Syariah baik penghimpunan dana maupun pembiayaan. Merumuskan dan menyusun strategi pemasaran baru. Melaksanakan kegiatan pemasaran produk, penghimpunan dana dan pembiayaan. Menyiapkan materi presentasi dalam rangka kegiatan pemasaran produk dana maupun pembiayaan di instansi pemerintah maupun swasta. Membuat dan menambah daftar kontak nasabah potensial nasabah untuk kepentingan pemasaran dan megkoordinasikan penerapan regulasi baru terkait dengan kegiatan pemasaran produk syariah.<sup>5</sup>

b. Seksi Pelayanan

Dalam tugasnya, kepala seksi pelayanan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pelayanan syariah. Mengelola kegiatan otorisasi atau persetujuan baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku. Mengelola cluis/khasanah (lemari penyimpanan uang, emas dan surat berharga). Melakukan *end of*

---

<sup>5</sup> Arsip *Job Description* Bank Jateng Cabang Syariah, h.13-14

*day* (pengakhiran kegiatan pelayanan dan penutupan modul) sesuai ketentuan yang berlaku. Menginventarisir semua transaksi yang menjadi kewenangannya yang kemudian dikoordinasikan kepada ketua tim pemasar sebagai salah satu implementasi pemasaran terintegrasi Pelaksana Seksi Pelayanan.<sup>6</sup> Adapun seksi pelayanan dalam Bank Jateng Syariah terdiri dari 3 sub divisi yaitu :

1. CS (*Customer Service*)

Melakukan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan pelayanan. Diantaranya melayani pembukaan, pemeliharaan dan penutupan rekening giro, tabungan dan deposito serta pemblokiran rekening nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Melayani dan memberikan informasi terkait produk, jasa dan layanan syariah lainnya kepada nasabah. Memberikan evaluasi dan mengusulkan kepada

---

<sup>6</sup> Arsip *Job Description* Bank Jateng Cabang Syariah, h.14-15



atasan terkait permasalahan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan tugas di *Customer Service* (CS).

## 2. *Teller*

Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan transaksi tunai nasabah baik untuk kebutuhan nasabah maupun kebutuhan *intern* Bank Jateng Syariah. Melayanai kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai, pengambilan atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan di bagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan bank.

## 3. ADM (*Back Office*)/ Kliring/ RTGS

Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kliring, BI RTGS, transfer dan inkaso serta transaksi non tunai lainnya. Melaksanakan pemeriksaan ulang

atas seluruh laporan operasional pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan transfer dan inkaso. Melakukan kegiatan baik penanaman maupun pencairan deposito berjangka. Menginventarisasi dan melaporkan transaksi non tunai diatas 100 juta sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup>

c. Seksi SDM dan Umum

Adalah bagian dalam Bank Jateng Cabang Syariah Sebagai *supervise* unit SDM dan umum yang bertanggungjawab terhadap kepastian dan kebenaran pelaksanaan dan mengadministrasikan segala transaksi yang berkaitan, serta koordinasi atas terselenggaranya penerimaan, penerus pendidikan, pengembangan karyawan, pengadministrasian harga dan inventaris bank, kelancaran logistic dan kegiatan pelayanan umum. Melakukan pengawasan dan pengendalian biaya-biaya personalia dan

---

<sup>7</sup> Arsip *Job Description* Bank Jateng Cabang Syariah, h.15-16

umum serta melakukan kegiatan kesekretariatan.<sup>8</sup>

d. Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan

Adalah salah satu bagian dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan legal dan administrasi pembiayaan Kantor Cabang Syariah Semarang dan Kantor Cabang Pembantu Syariah di wilayahnya. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penyelesaian pembiayaan di Kantor Cabang Pembantu Syariah di wilayahnya. Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada wakil pimpinan cabang Syariah. Mengkoordinasikan penerapan regulasi baru terkait dengan pengawasan pembiayaan.<sup>9</sup>

e. Seksi Akuntansi & TSI

---

<sup>8</sup> Arsip *Job Description* Bank Jateng Cabang Syariah, h. 21-22.

<sup>9</sup> Arsip *Job Description* Bank Jateng Cabang Syariah, h.17-18.

Adalah bagian yang bertugas mengkoordinasikan penerapan regulasi baru terkait dengan pengawasan pembiayaan. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi akuntansi dan teknologi sistem informasi sesuai peraturan yang berlaku. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan verifikasi, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan laporan keuangan. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan operasional teknologi system informasi juga menjadi bagian dari devisi ini.<sup>10</sup>

f. Seksi Pembiayaan

Tugas dan wewenang kepala seksi pembiayaan diantaranya mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pembiayaan. Memproses serta mengelola kegiatan pembiayaan. Mengevaluasi kelayakan pembiayaan yang disajikan analisis pembiayaan.

---

<sup>10</sup> Arsip *Job Description* Bank Jateng Cabang Syariah, h. 20-21.

Di samping itu, tugas dan wewenang pelaksana seksi pembiayaan ada 2 analisis yakni :

1) Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan bertugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pembiayaan. Memproses serta mengelola kegiatan pembiayaan. Memproses dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan menyusun laporan kunjungan lapangan dan laporan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku.

2) Analisis Pembiayaan Gadai/ *Rahn*

Kewenangan dan tugas analisis pembiayaan gadai tidak jauh berbeda dengan analisis pembiayaan, hanya saja pada bagian ini terfokus kepada pembiayaan gadai saja, termasuk di dalamnya melaksanakan dan

mengevaluasi kegiatan *rahn* (gadai emas).<sup>11</sup>

#### 6. Produk Bank Jateng Cabang Syariah Semarang<sup>12</sup>

Berbagai produk syariah telah diluncurkan ke masyarakat, sampai dengan tahun 2016 produk UUS Bank Jateng baik di bidang dana, pembiayaan maupun jasa lainnya adalah sebagai berikut:

##### a. Pendanaan

Simpanan nasabah Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dikemas dalam bentuk:

##### a) Giro IB Bank Jateng

Adalah produk simpanan yang menggunakan akad *Wadiah* merupakan titipan dana dalam bentuk giro dan tabungan di mana pemilik dana mendapatkan pendapatan berupa bonus. Penarikan giro iB bank Jateng dapat dilakukan dengan menggunakan media cek, bilyet giro

---

<sup>11</sup> Arsip Job Description Bank Jateng Cabang Syariah, h.17-18

<sup>12</sup> Lihat di lampiran (Brosur produk Bank Jateng Syariah Semarang)

ataupun surat perintah pembayaran lainnya yang sah.

b) Deposito iB Bank Jateng

Investasi dengan jangka waktu tertentu dengan bagi hasil tidak menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang berarti pihak Mudharib (bank) diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagihasilkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, antara bank dan nasabah.

c) Tabungan iB Bima

Tabungan yang memberi kemudahan dalam bertransaksi. yakni memberikan keleluasaan dalam melakukan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM

Prima. Menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil).

d) Tabungan iB Amanah

Adalah produk tabungan dengan menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Merupakan produk yang memberi kemudahan dalam bertransaksi sewaktu-waktu, tarik dan setor setiap saat menggunakan ATM Bank Jateng dan ATM Prima juga ATM Bersama.

e) iB Tabungan Haji

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk persiapan menunaikan ibadah haji. Merupakan produk yang menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah*, yang memberikan kemudahan transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng Syariah. Terdapat fasilitas pendaftaran haji secara online dengan Siskohat Kementerian Agama di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.



f) Simpanan Pelajar (Simpel iB)

Adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dalam rangka edukasi untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

b. Pembiayaan

Dalam operasionalnya Bank Jateng Syariah juga melayani pembiayaan dalam bentuk produk :

a) iB Griya Bank Jateng

Membantu kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki rumah, ruko, vila maupun apartemen idaman. iB Griya Bank Jateng menggunakan akad murabahah yaitu prinsip jual beli dimana harga jual ditetapkan berdasarkan harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama. Besar angsuran tidak berubah sampai akhir pembiayaan.

b) iB Multiguna

Adalah Pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk pembelian barang konsumtif seperti peralatan elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor baru atau bekas, yang tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip akadnya sama, yakni menggunakan akad *murabahah*, dengan ketentuan tidak berbeda juga yaitu kesepakatan harga telah disepakati harga barang ditambah margin keuntungan. Angsuran tetap sampai akhir pembiayaan.

c) iB Investasi

Pembiayaan yang didesain khusus bagi para pengusaha untuk pembelian atau pengadaan barang investasi seperti ruko, tukang, gudang, alat-alat berat, mesin, kendaraan dan barang pembiayaan yang digunakan untuk investasi usaha. Akad yang digunakan dalam

pembiayaan ini adalah akad *murabahah*, *musyarakah*, atau *mudharabah*.

d) iB Modal Kerja

Adalah fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk modal kerja atau usaha dengan prinsip bagi hasil yang adil dan menuju kemajuan bersama. Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* atau akad *musyarakah* (bagi hasil) dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

e) iB Gadai Emas Bank Jateng

Adalah fasilitas pembiayaan dengan akad *qardh* kepada nasabah dengan agungan berupa emas milik nasabah dengan mengikuti prinsip gadai. Barang ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank, atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip syariah.

f) iB Bima Emas

Adalah produk pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah*. Membantu nasabah yang ingin membeli emas dengan sistem pembayaran cicilan. Dengan ketentuan harga emas menyesuaikan saat akad, sehingga tidak takut ketika ada fluktuasi harga emas.

## **B. Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang**

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu mengalihka transaksi non syariah menjadi transaksi yang sesuai syariah. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang pun tidak melewatkan hakikat salah satu fungsi pelayanan bank syariah tersebut. Dalam salah satu layanannya, Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dapat membantu pembiayaan nasabah yang awalnya di bank non syariah dialihkan ke tansaksi syariah yakni menggunakan layanan *take over*.

Suku bunga bank konvensional yang fluktuatif membuat angsuran pembiayaan nasabah menjadi tidak

menentu. Penawaran pembiayaan di bank konvensional biasanya menetapkan dua jenis bunga, yaitu bunga kredit baru dan bunga kredit berjalan. Bunga kredit baru biasanya ditetapkan lebih rendah untuk jangka waktu tertentu, misalnya *fixed* satu tahun pertama atau *fixed* 5 tahun pertama, setelah lewat masa *fixed*, maka bunga akan disesuaikan dengan kondisi pasar, dikenal dengan sebutan bunga kredit berjalan. Pada umumnya bunga ini *direview* setiap bulan dan jika bank menganggap perlu, maka akan direvisi juga setiap bulan. Hal inilah yang menyebabkan angsuran nasabah menjadi tidak menentu. Kondisi ini sangat terasa apabila terjadi krisis ekonomi. Tetapi akan terasa menguntungkan nasabah bank syariah karena sistem yang dipakai adalah sistem jual beli dimana keuntungan bank telah ditetapkan di awal perjanjian. Hal tersebut menjadi salah satu alasan terjadinya nasabah mengalihkan hutang dari pembiayaan di bank non syariah ke bank syariah.

Respon positif masyarakat akan “gaya hidup halal” telah membawa mereka kepada kebutuhan jasa keuangan syariah. Bank Jateng Syariah Semarang menangkap baik akan adanya fenomena tersebut dengan menghadirkan layanan jasa *take over*. Pelayanan pengalihan hutang (*take over*) di bank Jateng syariah dapat dilakukan pada produk pembiayaan yang tersedia oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Pada

aplikasinya bank Bank Jateng Cabang Syariah Semarang membantu pengalihan hutang pembiayaan nasabah dari bank konvensional, kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan produk pembiayaan yang ada di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Seperti misalnya nasabah mengajukan pengalihan hutang (*take over*) dari pembiayaan KPR di bank konvensional, maka bank syariah men-*takeover*-kan mengkategorikan take over pembiayaan sesuai dengan skema iB Griya, begitu dengan produk pembiayaan lainnya, disesuaikan dengan pembiayaan sebelumnya di bank konvensional.<sup>13</sup>

Selain digunakan untuk *take over* pembiayaan KPR atau dalam Bank Jateng Cabang Syariah Semarang masuk dalam klasifikasi pembiayaan iB Griya, dapat juga digunakan *take over* untuk pembiayaan kendaraan, baik mobil maupun motor, untuk modal kerja, pengadaan barang dan lain sebagainya. *Take over* dapat digunakan untuk produk-produk yang memakai prinsip jual beli atau bagi hasil.

### **C. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang**

---

<sup>13</sup> *ibid*

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan layanan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Surat Direksi No. 0449/ H.T. 01. 01/ 2012/ tentang BPP Analisi Syariah.
5. Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.
6. Surat Edaran Bank Jateng Nomor 7627/ HT.01.03/ SYAR/ 2016 Semarang, 31 Agustus 2016 perihal Persyaratan dan Tata Cara *Take Over* Pembiayaan dari Bank Lain di Kantor Cabang Syaraih dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

---

<sup>14</sup> *Wawancara pribadi* dengan Bapak Joko Setya Budi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan, pada hari Kamis, 23 Februari 2017

#### **D. Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang Syariah**

Berdasarkan dasar hukum yang dianut dalam SOP Pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, memiliki persyaratan dan tata cara pembiayaan ditake over dari bank lain ke Bank Jateng Cabang Syariah Semarang adalah sebagai berikut :

1. Bagi calon nasabah perorangan :
  - a. Surat permohonan nasabah dalam pengajuan *take over* pembiayaan.
  - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk suami/istri yang masih berlaku.
  - c. Pas foto terbaru pemohon dan suami/istri.
  - d. Fotocopi Kartu Keluarga.
  - e. Fotocopi surat nikah (bagi yang telah menikah).
  - f. Fotocopi NPWP bagi calon nasabah yang mengajukan *take over* pembiayaan *plafond* di atas Rp. 100.000.000,-.
  - g. Daftar/ slip gaji terahir yang diterima diketahui bendahara atau pimpinan perusahaan tempat bekerja.



- h. Memiliki rekening tabungan/ giro di bank untuk mendukung penyelesaian kewajiban/ angsuran atas pembiayaan.<sup>15</sup>
2. Calon nasabah badan usaha atau perusahaan
- a. Surat permohonan perusahaan dalam pengajuan *take over* pembiayaan.
  - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk pengurus perusahaan yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan yang masih berlaku.
  - c. Fotocopi kata pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir.
  - d. Fotocopi SIUP dan TDP.
  - e. Laporan keuangan selama dua tahun terakhir beserta penjelasannya.
  - f. Fotocopi NPWP perusahaan bagi calon nasabah yang mengajukan *take over* pembiayaan dengan *plafond* diatas Rp. 100.000.000,-.
  - g. *Company profile*/ proposal perusahaan, struktur organisasi dan nama pengurus.
  - h. Memiliki rekening tabungan/ giro di bank untuk mendukung pembayaran kewajiban atau angsuran atas pembiayaan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Arsip Surat Edaran Bank Jateng Syariah lembar 1-2

<sup>16</sup> Arsip Surat Edaran Bank Jateng Syariah lembar 2-3

3. Petugas pembiayaan Bank Jateng Syariah melakukan *cheking* terhadap calon nasabah, memastikan bahwa calon nasabah adalah tidak tercantum dalam daftar hitam (*black list*).<sup>17</sup>
4. Untuk menentukan pemberian fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan produk pembiayaan yang terdapat di Bank Jateng Syariah, maka dilakukan pengkajian oleh petugas Bank Jateng Syariah melalui *interview* kepada calon nasabah.<sup>18</sup>
5. Ketentuan *plafond* dalam pemberian *take over* yaitu, fasilitas *take over* pembiayaan yang diajukan sesuai dengan saldo baki debet/ pokok dari bank lain, dan dilarang memperhitungkan denda, penalty, tunggakan bungadan lain-lain dalam pemberian *plafond* pembiayaan syariah. selanjutnya petugas analis pembiayaan memastikan jumlah total pelunasan pembiayaan dengan meminta nasabah untuk mencantumkan *outstanding* saldo terahir dari bank lain.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Rifki Muhammad Akbar, Pelaksana Analisis Pembiayaan, pada hari Kamis, 23 Februari 2017

<sup>18</sup> *ibid*

<sup>19</sup> *ibid*

6. Pengalihan hutang nasabah dari bank lain ke Bank Jateng Syariah dengan menggunakan beberapa alternatif ketentuan akad diantaranya adalah :<sup>20</sup>

a. Alternatif 1

- 1) Bank Jateng Syariah memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kreditnya, dan dengan demikian aset yang dibeli telah menjadi kepemilikan penuh oleh nasabah.
- 2) Nasabah menjual aset dimaksud poin 1) kepada Bank Jateng Syariah, dan dengan hasil penjualan aset tersebut nasabah melunasi *qardh*nya kepada Bank Jateng Syariah.
- 3) Bank Jateng Syariah menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

b. Alternatif 2

- 1) Bank Jateng Syariah membeli sebagian aset nasabah, dengan seijin bank lain sehingga dengan demikian terjadilah *syirkah al-milk* antara Bank Jateng Syariah dengan nasabah terhadap aset tersebut.

---

<sup>20</sup> Arsip Surat Edaran Bank Jateng Syariah lembar 5-6

- 2) Bagian aset yang dibeli Bank Jateng Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah bagian aset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada bank lain.
- 3) Bank Jateng Syariah menjual aset secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.

c. Alternatif 3

- 1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *iajarah* dengan Bank Jateng Syariah.
- 2) Apabila diperlukan, Bank Jateng Syariah dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *qardh*.
- 3) Akad *ijarah* sebagaimana dimaksudkan poin 1) tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2).
- 4) Besar imbalan jasa *ijarah* sebagaimana dimaksud angka 1) tidak boleh di dasarkan pada jumlah talangan yang diberikan Bank Jateng Syariah kepada nasabah.

d. Alternatif 4

- 1) Bank Jateng Syariah memberi *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutangnya) dan dengan demikian aset yang dibeli dengankredit telah enjadi kepemilikan penuh nasabah.
  - 2) Nasabah menjual aset dimaksud angak 1) kepada Bank Jateng Syariah, dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardhnya* kepada Bank Jateng Syariah.
  - 3) Bank Jateng Syariah menyewakan aset yang telah dibeli (miliknya) kepada nasabah, dengan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
7. Dari fasilitas pengalihan hutangnya, nasabah memiliki kewajiban menyerahkan agunan sebagai berikut :
- a. Asli surat pengangkatan atau surat keputusan terahir pegawai dan sebagainya dari perusahaan tempat nasabah bekerja.
  - b. SMH/ SHBG/ SHP atas tanah atau bangunan dan BPKB kendaraan bermotor roda empat dan atau dua. Tentunya, penentuan agunan yang ditetapkan, berdasar kepada analisis pembiayaan yang dilakukan oleh petugas Bank Jateng Syariah yang telah melakukan penilaian agunan secara saksama dan

melakukan analisa secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan besarnya plafon *take over* pembiayaan yang diberikan.

- c. Beberapa hal yang diperhatikan Bank Jateng Syariah dalam pemberian *qardh* kepada nasabah adalah :
  1. Dalam pemberian *qardh* kepada nasabah, dipastikan bahwa nasabah *take over* pembiayaan tersebut berkarakter baik, disiplin dana dapat dipercaya.
  2. *Qardh* diberikan kepada nasabah, dijelaskan secara detail penggunaanya dan batas waktu pengembalian *qard*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Rifki Muhammad Akbar, Pelaksana Analisis Pembiayaan, pada hari Kamis, 23 Februari 2017

## **BAB IV**

### **ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) DI BANK JATENG CABANG SYARIAH SEMARANG**

#### **A. Analisis Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.**

*Take over* atau disebut juga dengan pengalihan hutang adalah satu contoh transaksi yang menggambarkan gaya hidup halal di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pengalihan hutang dalam konteks skripsi ini adalah pengalihan kredit dalam dunia perbankan. Dalam hal ini pihak perbankan menjadi pihak ketiga yang memberi kredit kepada debitur (nasabah) untuk melunasi hutang atau kredit debitur kepada kreditur awal (bank konvensional) dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan debitur awal.

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menangkap baik adanya fenomena kebutuhan nasabah akan peralihan transaksi pembiayaan non syariah menjadi transaksi pembiayaan yang sesuai syariah tersebut. Pelayanan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dilakukan pada produk pembiayaan yang tersedia di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Sebagai mana dijelaskan pada BAB III tentang pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*), Bank Jateng Cabang

Syariah Semarang menggunakan empat alternatif akad yaitu diantaranya, *Qardh*, *murabahah*, *ijarah*, *ijarah mutahiya bi tamlik* dan *musyarakah*. Pemakaian 4 akad tersebut tidak lain adalah berpedoman terhadap fatwa DSN MUI Nomr 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang.

Secara lengkap pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang berpedoman pada Surat Edaran Bank Jateng Nomor 7627/ HT.01.03/ SYAR/ 2016 Semarang, 31 Agustus 2016 perihal Persyaratan dan Tata Cara *Take Over* Pembiayaan dari Bank Lain di Kantor Cabang Syariaih dan Kantor Cabang Pembantu Syariah. Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan layanan pengalihan hutang (*take over*) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Surat Direksi No. 0449/ H.T. 01. 01/ 2012/ tentang BPP Analisi Syariah.



5. Fatwa DSN MUI No. 31/ DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang Pengalihan Hutang.

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I, bahwa penulis menemukan sebuah diferensiasi penggunaan akad antara Surat Edaran Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI yang membahas mengenai pengalihan hutang (*take over*). Dalam operasionalnya Bank Jateng Cabang Syariah Semarang lebih cenderung mempraktikkan ketentuan fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang dengan skema penggunaan 4 alternatif akad penyelesaian pengalihan hutang (*take over*). Berbeda dengan konsep yang ditawarkan UU perbankan syariah yang menyatakan kegiatan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) salah satunya adalah pengalihan hutang berdasarkan akad *hiwalah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (pasal 19 UU Perbankan Syariah). Lebih jelas lagi, dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) yang merupakan pedoman pelaksanaan bank syariah juga dalam pasal 3 PBI (PBI No. 10/ 16/ PBI/ 2008) disebutkan pemenuhan prinsip syariah dilakuakn melalui kegiatan pelayanan jasa dengan menggunakan akad *hiwalah*, *kafalah* dan *sharf*, dalam hal ini pengalihan hutang disebutkan dengan istilah *hiwalah*.

Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, kedudukan sumber hukum berupa Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank

Indonesia adalah saling melengkapi. Dalam hal ini pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) dalam PBI yang kemudian diperjelas di SEBI, praktik *take over* hanya sebatas pengalihan hutangnya saja, tidak mengatur sampai penyelesaian pengalihan hutang. Kemudian dari prinsip ekonomi bank, apabila menggunakan akad *hiwalah* sebagaimana skema yang ditawarkan SEBI poin IV.2 yang diperbolehkan pengenaan imbalan (*ujroh*) atau biaya administrasi kepada nasabah secara langsung dan hanya sekali, dirasa akan memberatkan nasabah, karena nasabah harus membayar langsung biaya administrasi atau *ujroh* yang ditawarkan. Dalam SEBI juga dirasa tidak secara lengkap mengatur skema penyelesaian pengalihan hutang, hanya menjelaskan mekanisme pemberian talangan berupa dana *qardh* saja, tidak dijelaskan lagi mengenai skema pengembalian dana talangan tadi.

Oleh karena itu, pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menganut secara penuh skema yang ditawarkan oleh fatwa DSN MUI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang karena drasa paling realistis dan lengkap. Di dalamnya terdapat skema pengalihan hutang dan juga penyelesaian pengalihan hutang yang telah berjalan itu.

Mengutip dari pernyataan Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq., M.A. seorang ahli hukum dan selaku Dewan Pengawas Bank

Jateng Cabang Syariah, bahwa hukum yang disajikan dalam Islam memang beragam dan saling melengkapi. Dari fenomena pengalihan hutang, terdapat berbagai skema akad yang ada dalam fatwa DSN MUI, Bank Jateng Cabang Syariah menganut skema yang paling mudah dan realistis untuk diterapkan. Artinya sesuai dengan prinsip ekonomi bank dan demi keberlangsungan hidup bank itu sendiri, maka penggunaan bukan akad *hiwalah* atau *hiwalah* bil ujroh sebagaimana fatwa DSN MUI Nomor 12 Tahun 2000 dan fatwa DSN MUI Nomor 58 tahun 2007, sah-sah saja, karena hakikat muamalah adalah

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْ حَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.

Dengan begitu, hukum menggunakan akad *qard*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *ijarah mutahiya bi tamlik* dalam pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) menjadi boleh karena keempat akad tersebut telah dihalalkan oleh MUI dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Dari segi kedudukan, SEBI dan DSN MUI adalah sama-sama menjadi pedoman pelaksanaan transaksi di bank syariah.

---

<sup>1</sup> Wawancara langsung dengan Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.Ag pada 27 Maret 2017

Hanya saja dalam konteks pengalihan hutang (*take over*) di bank syariah ini cukup menjadi perhatian karena dalam Undang-Undang perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia belum ada yang mengatur secara jelas dan gamblang sampai penyelesaian transaksi pengalihan hutang (*take over*) dari bank lain ke bank syariah.

## **B. Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB III, pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menggunakan skema pengalihan hutang sesuai Surat Edaran Bank Jateng yakni menggunakan empat alternatif akad yang disesuaikan dengan jenis transaksi yang terjadi. Dalam melaksanakan transaksi pengalihan hutang (*take over*) Bank Jateng Cabang Syariah Semarang terlebih dahulu melakukan analisa pembiayaan, sebagaimana pemenuhan prinsip kehati-hatian bank.

Empat akad yang digunakan dalam transaksi pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syraiah Semarang adalah sebagai berikut :

### **1. Alternatif pertama**

Pada alternatif pertama ini Bank Jateng Cabang Syariah Semarang memberikan *qardh* kepada nasabah

yang kemudian digunakan oleh nasabah untuk melunasi kreditnya terhadap bank konvensional, dengan begitu aset telah menjadi kepemilikan penuh oleh nasabah. Selanjutnya, nasabah menjual kembali asetnya kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, dengan hasil penjualan tersebut nasabah melunasi *qardh* nya kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Selanjutnya, Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menjual kembali aset tadi kepada nasabah, dengan akad murabahah dan dibayar secara cicilan.

Pada alternatif pertama ini fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2001 Tentang *Qardh* dan fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang *Murabahah* berlaku dalam pembiayaan pengalihan hutang.

## 2. Alternatif kedua

Pada alternatif yang kedua Bank Jateng Cabang Syariah Semarang membeli sebagian aset nasabah dengan seizin Bank lain (LKK yang telah terjadi transaksi hutang sebelumnya). Dengan demikian terjadilah *syirkah al milk* antara Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dan nasabah tersebut. Aset yang telah dibeli nasabah ini adalah bagian dari aset yang senilai dengan hutang (sisanya) nasabah kepada bank lain. Kemudian Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menjual secara

*murabahah* aset yang menjadi miliknya kepada nasabah, dengan pembayaran secara angsuran.

Pada alternatif kedua ini fatwa DSN MUI Nomor 4 tahun 2000 Tentang *Murabahah* berlaku dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan hutang.

### 3. Alternatif ketiga

Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sesuai fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Ijarah. Kemudian apabila diperlukan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan akad *qardh* sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001. Akad *ijarah* yang digunakan oleh bank harus terpisah dari pemberian talangan berdasar akad *qardh* tadi. Besarnya imbalan jasa *ijarah* tidak boleh berdasarkan jumlah dana talangan yang diberikan.

### 4. Alternatif keempat

Pada alternatif keempat, Bank Jateng Cabang Syariah Semarang memberikan dana *qardh* kepada nasabah yang kemudian digunakan nasabah untuk melunasi hutangnya terhadap bank lain. Dengan demikian aset telah menjadi kepemilikan penuh nasabah. Kemudian

nasabah menjual aset tersebut kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Dengan hasil penjualan tersebut nasabah melunasi *qardh* nya kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Kemudian Bank Jateng Cabang Syariah Semarang menyewakan aset tersebut kepada nasabah dengan akad *ijarah mutahiya bitamlik*.

Pada alternatif ini fatwa DSN MUI Nomor 27 Tahun 2002 tentang *al ijarah muntahiya bitamblik* berlaku dalam pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*).

Memperhatikan pengalihan hutang dari segi pengertian, pengalihan hutang dalam hukum Islam disebut juga sebagai *hiwalah*. *Hiwalah* artinya memindahkan dan mengalihkan. Di Indonesia, pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) telah memperoleh landasan hukum positif. Dalam pasal 1400 KUH Perdata, pengalihan hutang disebut dengan peristiwa subrogasi. Subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada debitur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Dalam peristiwa pengalihan hutang (*take over*) Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, peristiwa ini tidak dapat disamakan dengan peristiwa subrogasi sesuai pasal 1400 KUH Perdata, karena dalam pelaksanaannya, pengalihan hutang di sini bukan berupa pemindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada debitur, melainkan pihak ketiga (Bank Jateng Cabang Syariah Semarang) hanya membantu

menyelesaikan pembiayaan nasabah (debitur) melalui pemberian dana pinjaman (*qard*) untuk menyelesaikan (melunasi) pembiayaan atau kredit kepada kreditur (bank lain). Setelah peristiwa pengalihan hutang tersebut, muncul akad baru yaitu penyelesaian *qard* dengan skema dan akad baru. Dalam peristiwa ini dapat dinyatakan bahwa pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang berbeda dengan konsep subrogasi sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1400 KUH Perdata.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pengalihan hutang (*take over*) di bank syariah terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syariah. Disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain meliputi melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad *hiwalah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad *hiwalah* secara teknis mendasarkan kepada PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/ 16/ PBI/ 2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, antara lain dilakukan melalui kegiatan pelayanan jasa dengan



mempergunakan antara lain akad *hiwalah*, *kafalah* dan *sharf*. Berdasarkan peraturan ini, pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) telah memiliki legal hukum lebih jelas yakni menggunakan akad *hiwalah*. Tidak disebutkan akad alternatif lainnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syariah yang menyebutkan boleh melakukan pengambialihan hutang berdasarkan akad *hiwalah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Lebih rinci lagi, praktik pengalihan hutang (*take over*) dijelaskan Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 14/ DpBS Perihal Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan jasa Bank Syariah pada poin IV.2. dijelaskan lebih rinci mengenai mekanisme pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah*. Pada poin IV.2. 2.f-g, dijelaskan skema pengalihan hutang yaitu bank menyediakan dana talangan (*qardh*) sebesar nilai pengalihan hutang nasabah kepada pihak ketiga. Bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* dalam batas kewajaran kepada nasabah dan bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah. Dalam hal ini Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dalam pelaksanaanya tidak sama dengan skema yang disuguhkan oleh PBI maupun SEBI dengan alasan prinsip ekonomi yang lebih memudahkan nasabah ketika pengembalian dana *qardh* secara angsuran dan menggunakan akad baru lagi.

Dalam hierarki hukum di Indonesia, lembaga keuangan termasuk di dalamnya adalah bank syariah merupakan lembaga yang patuh dan tunduk terhadap Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, bank syariah sudah sepantasnya patuh dan berpedoman pada UU Perbankan syariah. dalam peraturan perundangan yang menjadi payung hukum perbankan di Indonesia, disebutkan bahwa semua bank baik konvensional maupun syariah yang beroperasi di Indonesia berada di bawah pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, namun sejak tahun 2011 telah beralih tugas pengawasan, pembinaan dan perlindungan yang awalnya tugas BI beralih ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Bank Indonesia sebagai bank sentral nasional mengeluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) untuk mempertegas peraturan yang telah diturunkan oleh Undang-Undang dan kedudukan PBI mempunyai kekuatan hukum selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004). Tentang kekuatan hukum Peraturan Bank Indonesia lebih tegas lagi diungkapkan dalam UU Perbankan syariah (UU No. 10 Tahun 2004) ada beberapa pasal yang memerintahkan “ketentuan lebih lanjut mengenai hal tertentu diatur dalam PBI”.

Setelah PBI menjadi pelaksana Undang-Undang, ada lagi pelaksana PBI yakni SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia)

merupakan regulasi yang berisi ketentuan pelaksanaan PBI yang lebih detail dalam ketentuan pelaksanaan PBI.

Dalam hal ini akad *hiwalah* dan pengalihan hutang telah diatur dalam UU Perbankan Syariah, PBI, SEBI, dan DSN MUI, hanya saja terdapat beberapa perbedaan terkait skema pelaksanaannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya sekali lagi Bank Jateng Cabang Syariah mempraktikkan sesuai akad yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomr 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang.

Apabila melihat dari segi tatanan hukum nasional, fatwa DSN MUI tidaklah masuk ke dalam hierarki hukum di Indonesia, dan tidak dapat menjadi payung hukum secara positif. Kehadiran Fatwa DSN MUI adalah sebagai fasilitator bank syariah dalam operasionalnya yang memberikan solusi-solusi desain akad untuk dipraktikkan di bank syariah sehingga pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan syariah.

Dalam konteks hukum normatif perbedaan antara dua regulasi yang sama-sama menjadi pedoman pelaksanaan perbankan syariah kali ini memunculkan isu hukum, yaitu pertentangan hukum (*conflict of norm*). Dilihat dari analisis penulis kedua regulasi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan, diantaranya:

1. Pengalihan hutang (*take over*) sebagaimana yang diatur dalam PBI, dan SEBI menggunakan akad *hiwalah*
  - a. Kelebihan dari akad *hiwalah* yakni, sesuai dengan hakikat pengalihan hutang dalam Islam. Pemindahan hutang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain, dengan sistem *qardh*, bukan kemudian terjadi akad baru lagi. Sedangkan akad *qardh* yang diikuti akad baru seperti halnya *qardh wal murabahah*, sebagaimana alternatif pertama dalam fatwa DSN MUI masih ada beberapa pendapat yang mengukuhkan kehalalan akad tersebut karena riskan menyerupai *ba'i al-inah*.
  - b. Kekurangan dari skema yang ditawarkan SEBI dan PBI tentang akad pengalihan hutang menggunakan *hiwalah* adalah tidak lengkapnya skema yang ditawarkan, karena dalam SEBI tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan lengkap sampai penyelesaian pengalihan hutang tersebut. Dalam SEBI hanya mengatur sampai pemberian dana talangan saja, menggunakan dana *qardh* kemudian atas pemberian talangan tersebut diperbolehkan mengenakan imbalan sewajarnya

atau biaya administrasi sewajarnya. Selesai sampai di situ, tidak dijelaskan bagaimana skema pengembalian dana *qardh*.

2. Pengalihan hutang (*take over*) sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN MUI.
  - a. Kelebihan skema yang ditawarkan oleh DSN MUI adalah penyelesaian pengalihan hutang sangat jelas dan terstruktur secara lengkap, selain itu menurut Analisis Keuangan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, skema ini paling realistis diterapkan di perbankan. Dalam fatwa ini, ditawarkan beberapa macam desain akad untuk menyelesaikan pengalihan hutang yang sesuai dengan produk pembiayaan di perbankan. Dengan adanya empat skema akad tersebut, dari segi ekonomis hal itu juga terhitung lebih mendukung tingkat kesehatan bank, artinya, aset bank dapat bertambah dengan memberlakukannya pembiayaan untuk menyelesaikan pengalihan hutang.
  - b. Kekurangan dari skema yang ditawarkan oleh DSN MUI ini adalah ketidaksesuaian dengan skema akad pengalihan hutang dalam Islam (*hiwalah*), karena dalam skema ini, ditawarkan

penyelesaian pengalihan hutang dengan desain kombinasi akad yang beberapa masyarakat belum mengamini pernyataan halal oleh MUI terkait praktik *hybrid contrac* tersebut, sehingga masih banyak persepsi masyarakat yang ragu atas kesyariahan bank syariah. Dengan begitu, berkurang pula kuantitas pengguna bank syariah.

Hemat penulis, pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum positif ataupun hukum Islam. Karena dari segi hukum positif tidak ada larangan terkait pelaksanaan operasional bank syariah untuk selalu patuh terhadap Surat Edaran Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Urutannya UUD 1945, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda. Tidak ada penyebutan SE secara eksplisit. Kedudukan SEBI di Bank Jateng Syariah sendiri merupakan salah satu pedoman pelaksanaan operasional bank, hanya saja dalam menyikapi kebijakan, memang ada beberapa kebijakan yang hanya mengatur dasarnya saja, tidak secara gamblang sehingga diberi kesempatan untuk menyusun kebijakan

yang lebih lanjut dan lebih jelas, dengan berpedoman kepada kebijakan sebelumnya.

Pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang lebih memilih menggunakan empat akad alternatif sebagaimana yang ditawarkan oleh DSN MUI, bukan merupakan sebuah pelanggaran atau tindakan pidana dalam perbankan. Mengacu pada pasal 24 UU perbankan syariah tentang larangan bagi BUS dan UUS yaitu<sup>2</sup> ;

1. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam hal ini pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena menggunakan akad yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI

2. Dilarang melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal

Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tidak melakukan larangan poin ke 2.

---

<sup>2</sup>Naskah Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008  
Tentang Perbankan Syariah  
[http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf).

3. Dilarang melakukan penyertaan modal, kecuali pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah (untuk UUS tidak boleh) atau untuk kepentingan restrukturisasi pembiayaan.

Dalam konteks pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kali ini, tidak melanggar larangan poin ke 3.

4. Dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali agen pemasaran produk asuransi syariah. Dalam konteks pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kali ini, tidak melanggar larangan poin ke 4.

Dengan demikian, pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dikatakan sesuai hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam empat alternatif akad yang digunakan oleh Bank Jateng Cabang Syariah Semarang telah dilegalkan dan secara sah difatwakan oleh DSN MUI. Dari segi hukum positif, pelaksanaan pengalihan hutang tersebut juga dinilai tidak melanggar ketentuan larangan Undang-Undang perbankan syariah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai :

1. Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) ini Bank Jateng Cabang Syariah Semarang adalah berpedoman pada SE Direksi Nomor 7627/ HT.01.03/ SYAR/ 2016 Semarang, 31 Agustus 2016 perihal Persyaratan dan Tata Cara *Take Over* Pembiayaan dari Bank Lain di Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan skema empat alternatif akad yang serupa dengan Fatwa DSN MUI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang.

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit terhadap bank lain, dengan demikian kepemilikan aset telah menjadi kepemilikan penuh nasabah. Sampai di sini, pengalihan hutang telah terjadi. Sebagaimana definisi pengalihan hutang, adalah berpindahnya kewajiban *muhiil* (orang yang berhutang) kepada *muhal 'alaih* (penerima pemindahan) terhadap muhal (orang yang memberi hutang).

Selanjutnya terjadi skema penyelesaian pengalihan hutang, dengan hasil penjualan aset miliknya tersebut, nasabah menjual kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Nasabah mendapatkan dana atas hasil penjualan asetnya tadi, dengan dana tersebut nasabah melunasi *qardhnya* kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang.

Tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan kembali aset nasabah menggunakan beberapa akad yang ditawarkan diantaranya, *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *ijarah muntahiya bitamlik*. Desain akad selanjutnya untuk tahap pengembalian aset nasabah, disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Meski demikian, pada dasarnya ketentuan tentang pengalihan hutang telah disinggung pula dalam UU Perbankan Syariah, PBI, dan SEBI. Dalam ketiga regulasi tersebut, pengalihan hutang dalam perbankan syariah ditawarkan menggunakan akad *hiwalah*. Namun, dalam praktiknya akad *hiwalah* sebagaimana yang dijelaskan secara detail dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 14/DpBS 17 Maret 2008, penulis nilai belum sepenuhnya solutif. Dalam SEBI tersebut hanya mengatur tentang skema peristiwa pengalihan hutang saja dari mulai pemberian dana talangan berupa dana *qardh* untuk membayar hutang nsabaha kepada bank sebelumnya (bank konvesonal). Kemudian diatur

tentang pembolehan penarikan *ujroh* atau imbalan sewajarnya, dan biaya administrasi seajarnya. Tidak diatur bagaimana skema pengembalian dana *qardh*, apakah boleh dilakukan dengan akad *murabahah*, atau *musyarakah*, dan lain lain. Tidak dijelaskan pula mengenai sistem pembayarannya boleh dibayarkan secara cicilan atau harus langsung sekali terselesaikan.

Dengan begitu, dasar hukum yang digunakan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dalam operasional pengalihan hutang (*take over*) berpijak pada fatwa DSN MUI. Yang mana, penggunaan dasar hukum tersebut dinilai telah sesuai dengan kebutuhan bank. Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang kedudukan sumber hukum UU Perbankan Syariah, PBI, SEBI dan Fatwa DSN MUI adalah saling melengkapi.

2. Pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dari segi hukum Islam, telah sesuai dengan syariah. Pelaksanaan pengalihan hutang yang terjadi yaitu menggunakan penggabungan akad yang telah dilegalkan oleh DSN MUI yakni akad *qardh wal murabahah*, *qardh wal musyarakah*, *qardh wal ijarah*, dan *qardh wal ijarah muntahiya bitamlik*.

Dari segi hukum positif, pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dinilai tidak

melanggar Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Karena tidak menyalahi ketentuan ada dalam Undang-Undang tersebut.

## **B. Saran**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang” Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sampai saat ini, regulasi yang terbaru dari tentang pengalihan hutang di bank syariah adalah PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Bank Syariah. Di dalam PBI tersebut mengatur tentang pelayanan jasa di bank syariah salah satunya adalah pengalihan hutang menggunakan akad *hiwalah*. Namun penjelasan yang disuguhkan PBI ataupun turunannya (SEBI) tidak sepenuhnya jelas. Artinya, dalam regulasi tersebut hanya mengatur bagaimana mekanisme pengalihan hutangnya saja, tetapi belum dibahas hingga penyelesaian pengembalian dana talanganya menggunakan akad apa. Untuk itu, diharapkan Otoritas

Jasa Keuangan yang saat ini menjadi lembaga yang mengatur, mengawasi dan melindungi lembaga keuangan segera menerbitkan POJK terkait prosedur pengalihan hutang (*take over*) di Bank Syariah. Apakah harus menggunakan akad *hiwalah* saja atau boleh menggunakan akad lain yang diantaranya adalah 4 akad alternatif sesuai yang ditawarkan DSN MUI.

2. Dengan memperhatikan dan mengahawatirkan terjadinya pertentangan hukum yang terjadi antara fatwa DSN MUI dan Peraturan atau undang-undang hukum positif untuk perbankan, ada baiknya komunikasi yang baik antara kedua lembaga tersebut ketika mengeluarkan sebuah produk hukum sangat diperlukan. Sebagaimana kerancuan akad yang ditawarkan dalam pelaksanaan pengalihan hutang ini. Karena bagaimanapun kedua lembaga ini sama-sama menjadi pedoman pelaksanaan operasional bank syariah di Indonesia.

### C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah dzat yang maha benar, hanya karena ridho dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa *al inshanu mahalul khata wa nisyan* bahwa

manusia adalah tempat salah dan lupa. Penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidak mampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutuptutupi. Selanjutnya hanya kepada Allah penulis bertawakal dan berdoa dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai amal sholeh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan untuk dijadikan evaluasi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Abdillah, Mukhammad bin Ismail Abu, *Shahih al-Bukhari*, 1987 M/ 1407 H. editor : Mustafa Daib-Dar Ibn Katsir, Bigha Beirut.
- Ahmad, Antoni K, 2003, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Gitamedia press, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Jaziri, Abdurrahman 1969, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Mesir.
- Antonio, M. Syafi'i, 2001 *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta
- Antonio, M. Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- Arsip *Job Description* Bank Jateng Cabang Syariah
- Asikin, Amirudin Zainal, 2006, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Az-Huhaily, Wahbah, *Al-fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 5, (Damsyiq: Dar al-Fikri 1989), h. 162.
- Azwar, Saifuddin, 1997, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Az-zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 6, terj-Abdul Hayyie Al-Kattani, Gema Insani, Jakarta

Buku Profil Bank Jateng Syariah

Dahlan, Abdul Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Echols, John M dan Hasan Sadily, 1990, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Haris Herdiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta.

Hasan, Zubairi, 2009, *Undang-Undang Perbankan Syariah : Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta

Hasan, Zubairi, 2009, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hasanudin, 2009, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat.

Hassan, M. Khabir, Mervyn K, 2007, *Handbook of Islamic Banking*, Terjemah Saiful Anwar, Edward Elgar Publishing, USA.

Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Karim, Adiwarman, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Karim, Adiwarman, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Muhammad, Ali Jum'ah, dkk, 2009, *Mausu'ah Fatawa al-Muamalat al-Maliyah Lilmaryarif wa al-muassaat al-Maliyah, al-Islamiyah, al-Murabahah*, jilid 13, Dar al-Salam Lithaba'ah wa al-Tauzi' wa al-Tarjamah, Kairo.
- Munawwir, Ahmad, Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, 1995, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pasaribu, Cahiruman, suhrawardi, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rochaety, Eti dan Ratih Tresnati, 2005, *Kamus Istilah Ekonomi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Rozalinda, 2016 *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah*, Al-Maarif, Bandung.
- Sam, M. Ichwan dkk. 2014, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah NASional MUI)*, Erlangga, Jakarta

- Sjahdaeni, Sutan Remy, 2015, *Perbankan Syariah : Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sutrisno, Hadi, 1989, *Metodologi Penelitian Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Tim Penyusun, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tjitrosudibio, Subekti R., 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*: Pradnya Pramita, Jakarta.

Sumber Internet :

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan dikutip dari Lembaran Negara Tahun 2004 No. 53 sebagaimana dimuat dalam [http://www.parlemen.net/site/docs/UU\\_NO\\_10\\_2004.pdf](http://www.parlemen.net/site/docs/UU_NO_10_2004.pdf).

Naskah Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah [http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf).

Agustianto, “Inovasi Produk Perbankan Syariah dari Aspek Pengembangan Fikih Muamalah”, <http://shariaeconomics.wordpress.com/2011/10/13/inovasi-produk-perbankan-syariah-dari-aspek-pengembangan-fikih-muamalah/>, diakses 4 November 2016.

\_\_\_\_\_, “Hibrid Contract dalam Keuangan Syariah”, <http://www.agustiantocentre.com/?p=68>, diakses 4 November 2014.

[www.bankjateng.co.id](http://www.bankjateng.co.id)

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/01/18/ojy976382-bisnis-bank-syariah-2017-berpeluang-terus-melonjak-ini-alasannya>, diakses 9 Maret 2017

<http://www.arditobhinadi.com/berita-141-takeover-dari-transaksi-riba-ke-transaksi-syariah.html>. diakses 12 Januari 2017

Bank Indonesia :

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Perundang-undangan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.



## SURAT KETERANGAN

No: 3987/PRC.02.03/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menerangkan bahwa :

- Nama : MILLATURROFI'AH
- NIM : 132311011
- Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syari'ah
- Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

telah melaksanakan penelitian dengan judul "**Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang**" yang dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mulai tanggal **13 Februari s.d. 13 Maret 2017**.

Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Mei 2017

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis



**SUHARTO**  
Kepala



Nomor :  
Tanggal :

**LEGALITAS USAHA & AGUNAN**

- Bukti Kepemilikan : ☐ SHM ☐ SHGB ☐ SHGP ☐ BPKP ☐ Lainnya \_\_\_\_\_
- Nomor & Tanggal Bukti Kepemilikan : Nomor \_\_\_\_\_ Tgl. \_\_\_\_\_ Kendaraan Tahun \_\_\_\_\_
- Alamat Agunan : \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_
- Nama Pemilik Agunan : \_\_\_\_\_
- Alamat Pemilik Agunan : \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_
- Luas / Ukuran / Jumlah Agunan : Tanah \_\_\_\_\_ m2. Bangunan \_\_\_\_\_ m3. Kendaraan \_\_\_\_\_
- Harga Pasaran Terendah : Tanah \_\_\_\_\_ /m2. Bangunan \_\_\_\_\_
- Harga Kendaraan (Khusus Kendaraan) : Harga Beli \_\_\_\_\_ Harga Pasar saat ini \_\_\_\_\_
- Barang / Benda yang diagunkan lainnya : \_\_\_\_\_ Bukti Kepemilikan \_\_\_\_\_

**PETA LOKASI AGUNAN & TEMPAT USAHA**

Hubungan dengan Bank Lain : \_\_\_\_\_

Pemegang Rekening : \_\_\_\_\_

Pemegang Rekening : \_\_\_\_\_

Alamat / Lokasi tempat mendirikan usaha / pembiayaan Bank Jateng : \_\_\_\_\_

Nama Bank : \_\_\_\_\_

Jenis Pembiayaan : ☐ Modal Kerja ☐ Investasi ☐ Lainnya \_\_\_\_\_

Alamat Usaha : \_\_\_\_\_

Alamat Rumah : \_\_\_\_\_

Angguran / Tahun : \_\_\_\_\_

Jumlah Pembiayaan : \_\_\_\_\_

Tujuan Penggunaan : ☐ Modal Kerja ☐ Pembiayaan ☐ Pembiayaan ☐ Pembiayaan ☐ Pembiayaan

Jangka Waktu : \_\_\_\_\_

Perwakilan Pembiayaan : \_\_\_\_\_

Status Usaha / Perusahaan : ☐ MLL Sendiri ☐ MLL Orang Lain ☐ Koperasi ☐ Lainnya \_\_\_\_\_

Sifat Usaha / Usaha : ☐ Perorangan ☐ CV ☐ PT ☐ Koperasi ☐ Yayasan ☐ Lainnya \_\_\_\_\_

Waktu Pembiayaan : \_\_\_\_\_

**DATA - DATA YANG DILAMPIRKAN**

- ☐ Fotokopi KTP Suami & Istri yang masih berlaku
- ☐ Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku



## FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKSI

Nomor :

Tanggal :

### ASPEK KEUANGAN

#### DATA KEUANGAN LAINNYA

- Jumlah Uang Kas & Rekening Bank Yang ada saat ini : Rp. \_\_\_\_\_
- Jumlah Piutang / Tagihan saat ini : Rp. \_\_\_\_\_
- Jumlah Persediaan Barang saat ini : Rp. \_\_\_\_\_
- Biaya Dibayar Dimuka (contoh sisa sewa yang belum terpakai) : Rp. \_\_\_\_\_
- Nilai Pasar Terendah Tanah & Bangunan yang dimiliki saat ini : Rp. \_\_\_\_\_
- Nilai Pasar Terendah Kendaraan yang dimiliki saat ini : Rp. \_\_\_\_\_
- Nilai Pasar Terendah Peralatan Usaha yang dimiliki saat ini : Rp. \_\_\_\_\_
- Nilai Pasar Terendah Mesin-mesin yg dimiliki saat ini (khusus industri) : Rp. \_\_\_\_\_
- Hutang-hutang jangka waktu = 1 tahun yang harus dibayar saat ini : Rp. \_\_\_\_\_
- Hutang-hutang jangka waktu = 1 tahun yang harus dibayai saat ini : Rp. \_\_\_\_\_
- Modal yang telah ditanamkan dalam Usaha saat ini : Rp. \_\_\_\_\_
- Sisa Hasil Usaha yang belum dipakai (jika ada) : Rp. \_\_\_\_\_

#### PROYEKSI / RENCANA USAHA SETELAH MENDAPAT PEMBIAYAAN

- Proyeksi Penjualan/Pendapatan : ☐ Tetap ☐ Meningkat \_\_\_\_\_ % dari periode sebelumnya
- Harga Jual Barang : ☐ Tetap ☐ Meningkat \_\_\_\_\_ % dari periode sebelumnya
- Harga Pokok Penjualan/Produksi : ☐ Tetap ☐ Meningkat \_\_\_\_\_ % dari periode sebelumnya
- Biaya-biaya Operasional : ☐ Tetap ☐ Meningkat \_\_\_\_\_ % dari periode sebelumnya
- Pendapatan/Biaya Non Operasional : ☐ Tetap ☐ Meningkat \_\_\_\_\_ % dari periode sebelumnya
- Piutang/Tagihan Usaha : ☐ Tetap ☐ Lunas ☐ Meningkat \_\_\_\_\_ % dari periode sebelumnya
- Hutang Usaha : ☐ Tetap ☐ Lunas ☐ Meningkat \_\_\_\_\_ % dari periode sebelumnya

### LEGALISASI USAHA & AGUNAN

#### LEGALITAS USAHA

- Akta Pendirian (Khusus Badan Usaha) : Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_
- Akta Perubahan Terakhir (Khusus Badan Usaha) : Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) : Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_
- Surat Ijin Tetap Usaha (SITU) : Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_
- Tanda Daftar Industri (Khusus Industri) : Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_
- Ijin Lainnya : Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_
- Ijin Lainnya : Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_
- Ijin Lainnya : Nomor \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_



**FORMULIR PERMOHONAN  
PEMBIAYAAN PRODUK**

Nomor : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

**ASPEK SARANA**

- Fasilitas Telepon : ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Lainnya \_\_\_\_\_
- Fasilitas Listrik : ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Lainnya \_\_\_\_\_
- Fasilitas Air : ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Lainnya \_\_\_\_\_
- Fasilitas Pengolahan Limbah : ☐ Ada ☐ Tidak Ada ☐ Lainnya \_\_\_\_\_
- Mesin/Sarana Produksi/Lainnya : \_\_\_\_\_ Harga Pasar Rp. \_\_\_\_\_
- Kendaraan/Alat Angkut/Lainnya : \_\_\_\_\_ Harga Pasar Rp. \_\_\_\_\_
- Peralatan Toko/Kantor/Lainnya : \_\_\_\_\_ Harga Pasar Rp. \_\_\_\_\_
- Lainnya sebutkan : \_\_\_\_\_ Harga Pasar Rp. \_\_\_\_\_
- Lainnya sebutkan : \_\_\_\_\_ Harga Pasar Rp. \_\_\_\_\_
- Lainnya sebutkan : \_\_\_\_\_ Harga Pasar Rp. \_\_\_\_\_

**ASPEK KEUANGAN**

**LAPORAN LABA RUGI**

- Periode Laba : ☐ Bulanan ☐ Triwulan ☐ Semester ☐ Tahunan ☐ Lainnya \_\_\_\_\_
- Posisi Laporan : ☐ ☐ ☐ ☐ (bulan / tahun)

**PENDAPATAN**

- 1. Penjualan Rp. \_\_\_\_\_
- 2. Retur & Diskon Rp. \_\_\_\_\_ (-)
- 3. Penjualan Bersih (1-2) Rp. \_\_\_\_\_
- 4. Pendapatan Jasa (Khusus Usaha Jasa) Rp. \_\_\_\_\_ (+)
- 5. Total Pendapatan Rp. \_\_\_\_\_

**HARGA POKOK PENJUALAN (HPP) / PRODUKSI**

- 6. HPP (Modal) Rp. \_\_\_\_\_
- 7. Biaya Bahan Baku (Khusus Industri) Rp. \_\_\_\_\_
- 8. Biaya Tenaga Kerja langsung (Ind) Rp. \_\_\_\_\_
- 9. Biaya Overhead Langsung (Industri) Rp. \_\_\_\_\_ (+)
- 10. Jumlah HPP / Produksi Rp. \_\_\_\_\_ (-)
- 11. LABA KOTOR (5 - 10) Rp. \_\_\_\_\_

**BIAYA OPERASIONAL**

- 12. Biaya Tenaga Kerja/Pegawai Rp. \_\_\_\_\_
- 13. Biaya Transport/BBM/Oli Rp. \_\_\_\_\_
- 14. Biaya Listrik, Gas, Air Rp. \_\_\_\_\_
- 15. Biaya Telepon Rp. \_\_\_\_\_
- 16. Biaya Promosi / Pemasaran Rp. \_\_\_\_\_
- 17. Biaya Administrasi & Umum Rp. \_\_\_\_\_
- 18. Biaya Sewa Rp. \_\_\_\_\_
- 19. Biaya Retribusi / Pajak Rp. \_\_\_\_\_
- 20. Biaya Lainnya Rp. \_\_\_\_\_
- 21. Biaya Lainnya Rp. \_\_\_\_\_
- 22. Biaya Lainnya Rp. \_\_\_\_\_
- 23. Biaya Lainnya Rp. \_\_\_\_\_
- 24. JUMLAH BIAYA OPR (1 s/s 23) Rp. \_\_\_\_\_

25. Laba Operasional Rp. \_\_\_\_\_

(Laba Kotor - Juml Biaya Operasional)

26. Biaya Margin/Bagi Hasil Rp. \_\_\_\_\_ (-)

27. Laba Bersih Sebelum Pajak (25-26) Rp. \_\_\_\_\_

CATATAN :



**FORMULIR PERMOHONAN  
PEMBIAYAAN PRODUK**

Nomor :  
Tanggal :

**DATA PEMOHON**

- Nama Usaha / Perusahaan : \_\_\_\_\_
- Jenis Usaha : ☐ Industri ☐ Perdagangan ☐ Pertanian ☐ Hotel ☐ Jasa ☐ Lainnya \_\_\_\_\_
- Alamat Usaha / Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Telp. : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ Web : \_\_\_\_\_
- Nama (Key Person) : \_\_\_\_\_
- Alamat (Key Person) : \_\_\_\_\_  
Telp. : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ Web : \_\_\_\_\_
- Jabatan (Key Person) : ☐ Pemilik ☐ Direktur ☐ Pengelola ☐ Penanggung Jwb ☐ Lainnya \_\_\_\_\_
- Hub dg Bank Jateng Syariah :
  - Pemegang Rek. No. \_\_\_\_\_ Sejak : \_\_\_\_\_ (bln,)
  - Pemegang Rek. No. \_\_\_\_\_ Sejak : \_\_\_\_\_ (bln,)
  - Pernah / belum pernah menikmati fasilitas pembiayaan Bank Jateng Syariah :  
 Nomor Akad : \_\_\_\_\_ Atas Nama : \_\_\_\_\_  
 Pola Pembiayaan : ☐ Murabahah ☐ Mudharabah ☐ Musyarakah ☐ Lainnya \_\_\_\_\_  
 Plafond Pokok : \_\_\_\_\_ Jk. Waktu : \_\_\_\_\_ (bln,)
- Hubungan dengan Bank Lain :
  - Pemegang Rek. No. \_\_\_\_\_ Sejak : \_\_\_\_\_ (bln,)
  - Pemegang Rek. No. \_\_\_\_\_ Sejak : \_\_\_\_\_ (bln,)
  - Pernah / belum pernah menikmati fasilitas kredit/pembiayaan Bank lain :  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_ No. Perjanj : \_\_\_\_\_  
 Jenis Pembiayaan : ☐ Modal Kerja ☐ Investasi ☐ Lainnya : \_\_\_\_\_  
 Atas Nama : \_\_\_\_\_  
 Plafond Pokok : \_\_\_\_\_ Sisa Pokok : \_\_\_\_\_  
 Angsuran / bulan : \_\_\_\_\_ Jk Waktu : \_\_\_\_\_ (bln,)

**PLAFON PERMOHONAN**

- Jumlah Permohonan : \_\_\_\_\_ Status Permohonan : ☐ Lama/Mengulang ☐ Baru
- Tujuan Penggunaan : ☐ Modal Kerja ☐ Pemb. kendaraan ☐ Pemb. Mesin ☐ Pemb. Rumah ☐ Lainnya \_\_\_\_\_
- Jangka Waktu : ☐ bulan / tahun
- penjelasan Tambahan : \_\_\_\_\_

**MANAJEMEN USAHA**

- Status Usaha / Perusahaan : ☐ Milik Sendiri ☐ Milik Orang Lain ☐ Kerjasama ☐ Lainnya \_\_\_\_\_
- Bentuk Badan Usaha : ☐ Perorangan ☐ CV ☐ FA ☐ PT ☐ Koperasi ☐ Yayasan ☐ Lain \_\_\_\_\_
- Waktu Pendirian : ☐ bulan / tahun
- Nama Pengelola saat ini : \_\_\_\_\_
- Jumlah Tenaga Kerja : \_\_\_\_\_ orang / pegawai, dengan gaji rata-rata pegawai Rp. \_\_\_\_\_
- Nama Pengelola Keuangan : \_\_\_\_\_
- Arah/Ishtakal Keuangan : ☐ Pemeliharaan ☐ Catatan Keuangan ☐ Tidak Tersebut



# FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN INDIVIDU

Nomor :  
Tanggal :

## DATA JAMINAN

☐ TANAH

☐ RUMAH TINGGAL

☐ RUKO

• Alamat Jaminan :

Telp. : \_\_\_\_\_ Wilayah : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

• Tahun Dibangun :

Lantai : \_\_\_\_\_

Luas Bangunan : \_\_\_\_\_

• Harga Taksiran :

• Status Tanah : HGB / Hak Milik No : \_\_\_\_\_

• Berlaku hingga :

Atas Nama : \_\_\_\_\_

• Nama Pemilik

Jaminan / Penjamin :

Hubungan Keluarga : \_\_\_\_\_

• Alamat

Pemilik Jaminan :

Telp. : \_\_\_\_\_ Wilayah : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

☐ BPKB

• Merek Kendaraan :

☐ Sedan

☐ Minibus

☐ Lainnya \_\_\_\_\_

Tahun : \_\_\_\_\_ Warna : \_\_\_\_\_

• Harga Kendaraan :

Uang Muka : \_\_\_\_\_

• Nama Dealer :

• Alamat :

Telp. : \_\_\_\_\_

• Klasifikasi :

☐ Pemerintahan

☐ BUMN

☐ Perusahaan

☐ Swasta

## REFERENSI

1. Nama :

Perusahaan :

Posisi / Jabatan :

Alamat :

Telp. \_\_\_\_\_

2. Nama :

Perusahaan :

Posisi / Jabatan :

Alamat :

Telp. \_\_\_\_\_

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan Bank Jateng Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada bank untuk memotong dari Rekening Giro IB Bank Jateng, Tabungan IB Bima dan Tabungan Amanah saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan / atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan saya menyetujui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui / menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

**FORMULIR PERMOHONAN  
PEMBIAYAAN INDIVIDUAL**

Nomor :  
Tanggal :

**DATA PEMOHON**

- Jumlah Pembiayaan yang diajukan : \_\_\_\_\_
- Jenis Pengajuan : ☐ Baru ☐ Perubahan ☐ Take Over
- Tujuan Penggunaan : \_\_\_\_\_

**DATA PRIBADI PEMOHON**

- Nama : \_\_\_\_\_
- Jenis Kelamin : ☐ Laki - Laki ☐ Perempuan
- Tempat / Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_
- Status : ☐ Belum Menikah ☐ Menikah ☐ Janda / duda
- Nama Ibu Kandung : \_\_\_\_\_
- No KTP / Passport : \_\_\_\_\_
- NPWP : \_\_\_\_\_
- Jumlah Tanggungan : \_\_\_\_\_
- Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_
- Alamat Tinggal Sekarang : \_\_\_\_\_

Telepon : \_\_\_\_\_ Wilayah : \_\_\_\_\_  
Kode Pos : \_\_\_\_\_ Lama tinggal di alamat ini : \_\_\_\_\_

- Untuk keperluan mendadak hubungi ( yang tidak serumah ) :

Nama : \_\_\_\_\_ Hubungan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_ Wilayah : \_\_\_\_\_  
Kode Pos : \_\_\_\_\_ Lama tinggal di alamat ini : \_\_\_\_\_

- Waktu terbaik untuk menghubungi anda ☐ di Rumah, pukul : \_\_\_\_\_ ☐ di Kantor, pukul : \_\_\_\_\_
- Alamat Surat : \_\_\_\_\_

**DATA PEKERJAAN**

- Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
- Bidang Usaha : \_\_\_\_\_
- Jabatan / Pangkat : \_\_\_\_\_
- Mulai bekerja sejak : \_\_\_\_\_
- Alamat : \_\_\_\_\_

**DATA SUAMI / ISTRI**

- Nama : \_\_\_\_\_
- Tempat / Tgl Lahir : \_\_\_\_\_
- (Jika Bekerja) : \_\_\_\_\_
- Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_
- Bidang Usaha : \_\_\_\_\_



## FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUK

Tanggal :

• Nama Usaha / Perusahaan : \_\_\_\_\_  
 • Jenis Usaha : ☐ Industri ☐ Perdagangan ☐ Pertanian ☐ Hotel ☐ Jasa ☐ Lainnya \_\_\_\_\_  
 • Alamat Usaha / Perusahaan : \_\_\_\_\_  
 Telp. : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ Web : \_\_\_\_\_  
 • Nama (Key Person) : \_\_\_\_\_  
 • Alamat (Key Person) : \_\_\_\_\_  
 Telp. : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ Web : \_\_\_\_\_  
 • Jabatan (Key Person) : ☐ Pemilik ☐ Direktur ☐ Pengelola ☐ Penanggung Jwb ☐ Lainnya \_\_\_\_\_  
 • Hubungan dengan Bank Jateng Syariah :  
 - Pemegang Rek. No.                Sejak : \_\_\_\_\_ (bln, thn)  
 - Pemegang Rek. No.                Sejak : \_\_\_\_\_ (bln, thn)  
 - Pernah / belum pernah menikmati fasilitas pembiayaan Bank Jateng Syariah :  
 Nomor Akad : \_\_\_\_\_ Atas Nama : \_\_\_\_\_  
 Pola Pembiayaan : ☐ Murabahah ☐ Mudharabah ☐ Musyarakah ☐ Lainnya \_\_\_\_\_  
 Plafond Pokok : \_\_\_\_\_ Jk. Waktu : \_\_\_\_\_ (bln, thn)  
 • Hubungan dengan Bank Lain :  
 - Pemegang Rek. No.                Sejak : \_\_\_\_\_ (bln, thn)  
 - Pemegang Rek. No.                Sejak : \_\_\_\_\_ (bln, thn)  
 - Pernah / belum pernah menikmati fasilitas kredit/pembiayaan Bank lain :  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_ No. Perjanj : \_\_\_\_\_  
 Jenis Pembiayaan : ☐ Modal Kerja ☐ Investasi ☐ Lainnya : \_\_\_\_\_  
 Atas Nama : \_\_\_\_\_  
 Plafond Pokok : \_\_\_\_\_ Sisa Pokok : \_\_\_\_\_  
 Angsuran / bulan : \_\_\_\_\_ Jk Waktu : \_\_\_\_\_ (bln, thn)

• Jumlah Permohonan : \_\_\_\_\_ Status Permohonan : ☐ Lama/Mengulang ☐ Baru  
 • Tujuan Penggunaan : ☐ Modal Kerja ☐ Pemb. kendaraan ☐ Pemb. Mesin ☐ Pemb. Rumah ☐ Lain  
 • Jangka Waktu :   bulan / tahun  
 • penjelasan Tambahan : \_\_\_\_\_

● Status Usaha / Perusahaan : ☐ Milik Sendiri ☐ Milik Orang Lain ☐ Kerjasama ☐ Lainnya \_\_\_\_\_  
 ● Bentuk Badan Usaha : ☐ Perorangan ☐ CV ☐ FA ☐ PT ☐ Koperasi ☐ Yayasan ☐ Lain \_\_\_\_\_  
 ● Waktu Pendirian :   bulan / tahun  
 ● Nama Pengelola saat ini : \_\_\_\_\_  
 ● Jumlah Tenaga Kerja : \_\_\_\_\_ orang / pegawai, dengan gaji rata-rata pegawai Rp. \_\_\_\_\_  
 ● Nama Pengelola Keuangan : \_\_\_\_\_  
 ● AkadabIntansi Keuangan : ☐ BerakadabIntansi ☐ Catatan Sederhana ☐ Tidak TerakadabIntansi



2. Investasi : ☐ Untuk Memperoleh Profit ☐ Pengembangan Dana  
☐ Lainnya.....
3. Transaksi : ☐ Keperluan Sehari-hari ☐ Transaksi Usaha  
☐ Lainnya.....

#### D. JENIS REKENING YANG DIBUKA

1. Giro : ☐ Rupiah ☐ Valas  
Setoran Pertama Rp. ....
2. Tabungan : ☐ iB Amanah ☐ iB Bima ☐ iB Tabung Haji  
☐ SimPel iB ☐ Lainnya  
Setoran Pertama Rp. ....
3. Simpanan Berjangka : ☐ Deposito Berjangka ☐ Sertifikat Deposito  
☐ DOC ☐ Bepede Save

#### E. DIISI KHUSUS JIKA REKENING YANG DIBUKA ADALAH SIMPANAN BERJANGKA

1. Nominal Simpanan (Rp/Va) : Rp. ....  
☐ Rupiah ☐ Valas  
Transaksi Penempatan : ☐ Tunai ☐ Pindahbuku dari  
Rek. No. ....
2. Jangka Waktu Simpanan  
☐ 1 bulan ☐ 3 bulan ☐ 6 bulan ☐ 12 bulan ☐ 24 bulan  
☐ 4 s/d 7 hari ☐ 8 s/d 14 hari ☐ 15 s/d 28 hari
3. Model Perpanjangan :  
☐ Non R/O ☐ R/O Pokok ☐ R/O Pokok + Bagi Hasil
4. Rekening Bagi Hasil : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

#### I. PERNYATAAN KEBENARAN DATA & PENUNDUKAN PADA KETENTUAN BANK

Atas pengisian data-data dan penandatanganan formulir ini, Saya/Kami/Pemohon menyatakan bahwa data tersebut diatas dibuat dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya. Selanjutnya mohon dicatat sebagai Pemegang Rekening atau Nasabah Giro / Tabungan / Simpanan Berjangka\*) di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa dan atas pencatatan tersebut, Saya / Kami / Pemohon bersedia mengikatkan diri, menerima, tunduk dan taat pada peraturan-peraturan, syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

Pemohon

\*) coret yang tidak perlu

#### J. DIISI OLEH PETUGAS BANK

No. CIF :   
No. Rekening :   
Kode Produk :  Nama Produk : .....  
Kode Golongan Pemilik :   
Jenis Risiko Nasabah : ☐ LOW RISK ☐ MODERATE RISK ☐ HIGH RISK

#### F. REKENING BANK LAIN YANG DIMILIKI

1. Bank .....  
☐ Giro ☐ Tabungan ☐ Deposito ☐ Pembiayaan
2. Bank .....  
☐ Giro ☐ Tabungan ☐ Deposito ☐ Pembiayaan

#### G. AHLI WARIS YANG DITUNJUK

1. Nama : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
Hubungan Keluarga :  
☐ Anak ☐ Orang Tua ☐ Suami ☐ Istri ☐ Lain
2. Nama : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
Hubungan Keluarga :  
☐ Anak ☐ Orang Tua ☐ Suami ☐ Istri ☐ Lain

#### H. SAUDARA / TEMEN DEKAT / ORANG YANG DAPAT DIPANGGIL PADA SAAT DARURAT / MENDESAK

Nama : .....  
Alamat Tempat Tinggal : .....  
Nomor Telepon Rumah:







**FORMULIR PERMOHONAN  
PEMBIAYAAN INDIVIDU**

Nomor :  
Tanggal :

**DATA KEUANGAN**

- Penghasilan bersih / bulan pemohon
- Penghasilan bersih / bulan Suami/Istri
- Penghasilan Tambahan (Jika Ada)
- JUMLAH PENGHASILAN**
- Biaya hidup / Pengeluaran per bulan
- Angsuran dari pinjaman lainnya / bulan
- JUMLAH PENGELUARAN**
- SISA PENGHASILAN BERSIH**

**DATA KEKAYAAN**

JENIS	JUMLAH	LOKASI / MERK	NILAI Rp.
<input type="checkbox"/> Rumah			
<input type="checkbox"/> Mobil			

**SIMPANAN / REKENING DI BANK**

NAMA BANK	JENIS SIMPANAN	ATAS NAMA	NOMOR REKENING

**PINJAMAN LAIN**

NAMA KREDITUR	JENIS PINJAMAN / CREDIT CARD	JUMLAH PINJAMAN	JATUH TEMPO
---------------	------------------------------	-----------------	-------------

PLAFON	12.5%										12.5%										12.5%													
	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168
10,000,000	901,592	478,807	338,435	268,871	227,480	200,319	181,105	167,012	156,274	147,840	141,134	135,735	127,468	120,000	113,400	107,000	100,800	94,800	89,000	83,300	901,592	478,807	338,435	268,871	227,480	200,319	181,105	167,012	156,274	147,840	141,134	135,735	127,468	120,000
20,000,000	1,803,185	957,614	676,869	537,742	454,959	400,638	362,210	334,023	312,548	295,680	282,267	271,471	262,335	254,936	248,400	242,800	236,200	229,600	223,000	216,400	1,803,185	957,614	676,869	537,742	454,959	400,638	362,210	334,023	312,548	295,680	282,267	271,471	262,335	254,936
30,000,000	2,704,777	1,436,421	1,015,304	806,613	682,439	600,957	543,315	501,035	468,822	443,519	423,401	407,206	393,502	382,405	372,300	362,200	352,100	342,000	331,900	321,800	2,704,777	1,436,421	1,015,304	806,613	682,439	600,957	543,315	501,035	468,822	443,519	423,401	407,206	393,502	382,405
40,000,000	3,606,370	1,915,229	1,353,738	1,075,484	909,918	801,276	724,421	668,046	625,096	591,359	564,534	542,942	524,670	509,873	494,942	484,942	474,942	464,942	454,942	444,942	3,606,370	1,915,229	1,353,738	1,075,484	909,918	801,276	724,421	668,046	625,096	591,359	564,534	542,942	524,670	509,873
50,000,000	4,507,962	2,394,036	1,692,173	1,344,355	1,137,398	1,001,595	905,526	835,058	781,370	739,199	705,668	678,677	655,837	637,341	624,942	612,542	600,142	587,742	575,342	562,942	4,507,962	2,394,036	1,692,173	1,344,355	1,137,398	1,001,595	905,526	835,058	781,370	739,199	705,668	678,677	655,837	637,341
60,000,000	5,409,555	2,872,843	2,030,608	1,683,726	1,364,877	1,202,914	1,086,631	1,002,069	937,644	887,039	846,805	814,413	787,005	764,809	752,409	740,009	727,609	715,209	702,809	690,409	5,409,555	2,872,843	2,030,608	1,683,726	1,364,877	1,202,914	1,086,631	1,002,069	937,644	887,039	846,805	814,413	787,005	764,809
70,000,000	6,311,147	3,351,650	2,369,047	1,882,097	1,599,836	1,402,233	1,267,736	1,167,081	1,093,918	1,034,879	987,935	954,488	922,041	899,594	887,147	874,747	862,347	850,000	837,653	825,306	6,311,147	3,351,650	2,369,047	1,882,097	1,599,836	1,402,233	1,267,736	1,167,081	1,093,918	1,034,879	987,935	954,488	922,041	899,594
80,000,000	7,212,740	3,830,457	2,707,477	2,150,967	1,819,836	1,602,553	1,448,841	1,336,092	1,250,192	1,182,718	1,130,558	1,090,000	1,050,000	1,010,000	987,553	975,153	962,753	950,353	937,953	925,553	7,212,740	3,830,457	2,707,477	2,150,967	1,819,836	1,602,553	1,448,841	1,336,092	1,250,192	1,182,718	1,130,558	1,090,000	1,050,000	
90,000,000	8,114,332	4,309,264	3,045,912	2,419,838	2,047,316	1,802,872	1,629,946	1,503,104	1,406,466	1,330,558	1,270,202	1,221,619	1,180,507	1,140,395	1,100,283	1,087,883	1,075,483	1,063,083	1,050,683	1,038,283	8,114,332	4,309,264	3,045,912	2,419,838	2,047,316	1,802,872	1,629,946	1,503,104	1,406,466	1,330,558	1,270,202	1,221,619	1,180,507	1,140,395
100,000,000	9,015,925	4,788,071	3,384,346	2,688,709	2,274,795	2,003,191	1,811,051	1,670,115	1,562,740	1,478,398	1,411,336	1,357,355	1,311,675	1,271,563	1,231,451	1,211,051	1,198,651	1,186,251	1,173,851	1,161,451	9,015,925	4,788,071	3,384,346	2,688,709	2,274,795	2,003,191	1,811,051	1,670,115	1,562,740	1,478,398	1,411,336	1,357,355	1,311,675	1,271,563
110,000,000	9,917,517	5,266,878	3,722,781	2,957,580	2,502,755	2,203,510	1,992,157	1,803,127	1,719,014	1,626,238	1,552,469	1,493,090	1,442,842	1,402,150	1,361,850	1,341,450	1,329,050	1,316,650	1,304,250	1,291,850	9,917,517	5,266,878	3,722,781	2,957,580	2,502,755	2,203,510	1,992,157	1,803,127	1,719,014	1,626,238	1,552,469	1,493,090	1,442,842	1,402,150
120,000,000	10,819,110	5,745,486	4,061,215	3,226,451	2,729,755	2,403,829	2,173,262	1,984,139	1,875,288	1,782,018	1,707,918	1,643,549	1,592,201	1,551,853	1,511,505	1,491,105	1,478,705	1,466,305	1,453,905	1,441,505	10,819,110	5,745,486	4,061,215	3,226,451	2,729,755	2,403,829	2,173,262	1,984,139	1,875,288	1,782,018	1,707,918	1,643,549	1,592,201	1,551,853
130,000,000	11,720,702	6,224,493	4,399,650	3,495,322	2,957,234	2,604,148	2,354,367	2,171,150	2,031,562	1,921,918	1,834,736	1,764,561	1,705,177	1,654,829	1,614,481	1,594,081	1,581,681	1,569,281	1,556,881	1,544,481	11,720,702	6,224,493	4,399,650	3,495,322	2,957,234	2,604,148	2,354,367	2,171,150	2,031,562	1,921,918	1,834,736	1,764,561	1,705,177	1,654,829
140,000,000	12,622,295	6,703,300	4,738,085	3,764,193	3,184,714	2,804,467	2,535,472	2,338,162	2,187,836	2,069,757	1,975,870	1,900,297	1,836,345	1,785,997	1,745,649	1,725,249	1,712,849	1,700,449	1,688,049	1,675,649	12,622,295	6,703,300	4,738,085	3,764,193	3,184,714	2,804,467	2,535,472	2,338,162	2,187,836	2,069,757	1,975,870	1,900,297	1,836,345	1,785,997
150,000,000	13,523,887	7,182,107	5,076,519	4,033,064	3,412,193	3,004,786	2,716,577	2,505,173	2,344,110	2,217,597	2,125,003	2,050,437	1,985,991	1,935,643	1,895,295	1,874,895	1,862,495	1,850,095	1,837,695	1,825,295	13,523,887	7,182,107	5,076,519	4,033,064	3,412,193	3,004,786	2,716,577	2,505,173	2,344,110	2,217,597	2,125,003	2,050,437	1,985,991	1,935,643
160,000,000	14,425,480	7,660,914	5,414,954	4,301,935	3,639,673	3,205,105	2,897,682	2,672,185	2,506,658	2,375,172	2,282,577	2,207,011	2,131,445	2,080,997	2,040,649	2,020,249	2,009,849	1,999,449	1,989,049	1,978,649	14,425,480	7,660,914	5,414,954	4,301,935	3,639,673	3,205,105	2,897,682	2,672,185	2,506,658	2,375,172	2,282,577	2,207,011	2,131,445	2,080,997
170,000,000	15,327,072	8,139,728	5,753,388	4,570,806	3,867,152	3,405,424	3,078,787	2,839,196	2,656,658	2,513,227	2,399,270	2,307,503	2,221,937	2,161,371	2,120,023	2,100,023	2,089,623	2,079,223	2,068,823	2,058,423	15,327,072	8,139,728	5,753,388	4,570,806	3,867,152	3,405,424	3,078,787	2,839,196	2,656,658	2,513,227	2,399,270	2,307,503	2,221,937	2,161,371
180,000,000	16,228,665	8,618,528	6,091,823	4,839,677	4,094,632	3,605,743	3,259,892	3,006,208	2,812,932	2,661,117	2,540,404	2,443,239	2,361,074	2,299,908	2,258,560	2,238,160	2,227,760	2,217,360	2,206,960	2,196,560	16,228,665	8,618,528	6,091,823	4,839,677	4,094,632	3,605,743	3,259,892	3,006,208	2,812,932	2,661,117	2,540,404	2,443,239	2,361,074	2,299,908
190,000,000	17,130,257	9,097,336	6,430,258	5,108,548	4,322,111	3,806,062	3,440,998	3,173,219	2,969,206	2,808,956	2,681,538	2,578,974	2,492,182	2,430,016	2,388,668	2,368,268	2,357,868	2,347,468	2,337,068	2,326,668	17,130,257	9,097,336	6,430,258	5,108,548	4,322,111	3,806,062	3,440,998	3,173,219	2,969,206	2,808,956	2,681,538	2,578,974	2,492,182	2,430,016
200,000,000	18,031,850	9,576,143	6,768,692	5,377,419	4,549,591	4,006,381	3,622,103	3,340,231	3,125,480	2,956,756	2,822,671	2,720,105	2,633,319	2,571,153	2,529,805	2,509,405	2,498,005	2,487,605	2,477,205	2,466,805	18,031,850	9,576,143	6,768,692	5,377,419	4,549,591	4,006,381	3,622,103	3,340,231	3,125,480	2,956,756	2,822,671	2,720,105	2,633,319	2,571,153
210,000,000	18,933,442	10,054,950	7,107,127	5,646,290	4,777,070	4,206,700	3,804,208	3,507,242	3,281,754	3,104,636	2,963,805	2,850,445	2,763,519	2,691,353	2,649,005	2,628,605	2,617,205	2,606,805	2,596,405	2,586,005	18,933,442	10,054,950	7,107,127	5,646,290	4,777,070	4,206,700	3,804,208	3,507,242	3,281,754	3,104,636	2,963,805	2,850,445	2,763,519	2,691,353
220,000,000	19,835,035	10,533,757	7,445,561	5,915,161	5,004,550	4,407,020	3,984,313	3,674,254	3,438,078	3,252,476	3,104,938	2,986,181	2,885,684	2,803,518	2,751,352	2,729,952	2,718,552	2,707,152	2,695,752	2,684,352	19,835,035	10,533,757	7,445,561	5,915,161	5,004,550	4,407,020	3,984,313	3,674,254	3,438,078	3,252,476	3,104,938	2,986,181	2,885,684	2,803,518
230,000,000	20,736,627	11,012,564	7,783,996	6,184,031	5,232,029	4,607,039	4,165,418	3,841,266	3,594,302	3,400,316	3,246,072	3,121,916	3,016,852	2,934,686	2,882,520	2,861,120	2,850,000	2,838,880	2,827,760	2,816,640	20,736,627	11,012,564	7,783,996	6,184,031	5,232,029	4,607,039	4,165,418	3,841,266	3,594,302	3,400,316	3,246,072	3,121,916	3,016,852	2,934,686
240,000,000	21,638,220	11,491,371	8,122,431	6,452,902	5,459,509	4,807,658	4,346,523	4,008,277	3,750,576	3,548,155	3,381,205	3,257,652	3,148,019	3,059,233	2,997,067	2,975,667	2,964,547	2,953,427	2,942,307	2,931,187	21,638,220	11,491,371	8,122,431	6,452,902	5,459,509	4,807,658	4,346,523	4,008,277	3,750,576	3,548,155	3,381,205	3,257,652	3,148,019	3,059,233
250,000,000	22,539,812	11,970,178	8,460,865	6,721,773	5,686,989	5,007,977	4,527,628	4,175,289	3,906,850	3,695,995	3,528,339	3,393,387	3,279,187	3,18																				



## BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Millaturrofi'ah  
Alamat : Kaligetas Rt 04/ Rw 04 Jatibarang Mijen  
Semarang  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 23 September 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Tinggal Sekarang : Kaligetas Rt 04/ Rw 04 Jatibarang Mijen  
Semarang  
No Hp/ Email : 085713843979/ [millaforshei@gmail.com](mailto:millaforshei@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. RA Miftahul Huda, Lulus Tahun 2001
2. MI Miftahul Huda, Lulus Tahun 2007
3. SMP N 23 Semarang, Lulus Tahun 2010
4. MAN N 1 Semarang, Lulus Tahun 2013
5. UIN Walisongo Semarang Lulus Tahun 2017

Pengalaman Organisasi :

1. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (ForSHEI) 2014-2016  
(Koordinator Bidang Media dan Jurnalistik)
2. Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI)  
Komisariat Semarang 2013-2014 (Koordinator Bidang  
Kajian dan Keilmuan)
3. Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Regional  
Jawa Tengah 2016-2017 (Koordinator Bidang KOMINFO)

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 4 Juni 2017  
Hormat saya,



**Millaturrofi'ah**  
**132311011**